

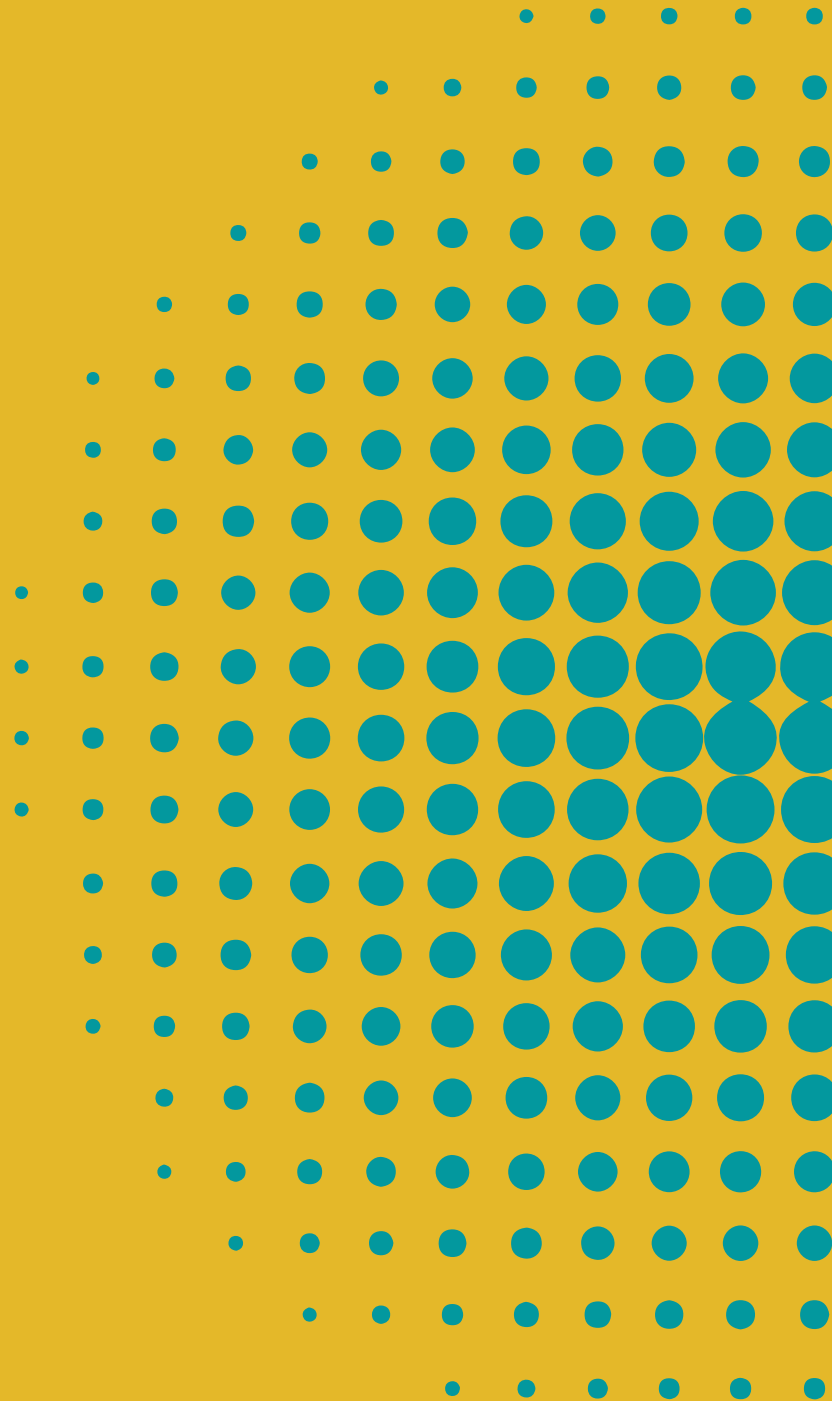


DISDUKCAPIL

KAB. PASAMAN BARAT

PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan ridha-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 dengan lancar.

Buku ini disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474/84558/MD tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diamanatkan pada Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berisi gambaran umum tentang kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat yang bersumber dari data pelayanan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), database kependudukan nasional yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017, dan data yang bersumber dari instansi sektoral terkait.

Dengan diterbitkannya buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas, lembaga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lain untuk mendukung perencanaan dan peningkatan pelayanan publik serta pembangunan sektor lain.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Simpang Ampek, Oktober 2018
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat

YULISNA, S.H.
NIP. 19650703 199102 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Sumber Data.....	4
E. Pengertian Umum.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT	11
A. Letak Geografis dan Administratif	11
B. Topografi	16
BAB III KUANTITAS PENDUDUK	17
A. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	17
1. Persebaran Penduduk	17
2. Kepadatan penduduk	19
3. Pertumbuhan Penduduk	21
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	23
1. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	23
2. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	27
3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	29
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	32
1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	32
2. Komposisi Penduduk Menurut Agama	35
3. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	36
4. Rata-rata Umur Kawin Pertama	41
5. Angka Perkawinan Kasar	42
6. Angka Perkawinan Umum	43
D. Keluarga	44
1. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga	44
2. Jumlah keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	45
3. Karakteristik Kepala Keluarga	47
a. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin.....	47

b. Jumlah dan Proporsi Kepala keluarga Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin	48
c. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Jenis kelamin	50
d. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	51
e. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin	52
f. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan jenis Kelamin.....	54
g. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan jenis Kelamin.....	55
h. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin.....	57
BAB IV KUALITAS PENDUDUK	60
A. Kelahiran	60
1. Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate</i>)	60
2. Angka Kelahiran Umum (<i>General Birth Rate</i>).....	61
3. Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ratio</i>).....	62
B. Pendidikan	63
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	63
2. Angka Partisipasi Murni (APM)	64
3. Angka Putus Sekolah (APS).....	65
4. Rata-rata Lama Sekolah RLS).....	66
C. Ekonomi	67
1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	67
2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	70
3. Pengangguran	73
D. Sosial	75
BAB V MOBILITAS PENDUDUK	79
A. Migrasi Masuk	80
B. Migrasi Keluar	82
C. Migrasi Netto	83

BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	86
A. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	86
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).....	87
C. Kepemilikan Akta	89
1. Akta Kelahiran	89
2. Akta Kematian	90
3. Akta Perkawinan/Buku Nikah.....	90
4. Akta Perceraian/Surat Cerai	92
BAB VII PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	18
Tabel 3.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	20
Tabel 3.3	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	23
Tabel 3.4	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	25
Tabel 3.5	Rasio Jenis Kelamin (Sex ratio) Kab. Pasaman Barat tahun 2017	28
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Kab. Pasaman Barat Menurut Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua Tahun 2017	31
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Kab. Pasaman Barat berusia ≥ 7 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2017	33
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Kab. Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2017	35
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan Tahun 2017	37
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan Tahun 2017	38
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2017.....	40
Tabel 3.12	Rata-rata Usia Kawin Pertama Penduduk Kab. Pasaman Barat Tahun 2017	41
Tabel 3.13	Angka Perkawinan Kasar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	42
Tabel 3.14	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan tahun 2017.....	43
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Jenis Kelamin Dan Status Hubungan Dalam Keluarga Tahun 2017.....	44
Tabel 3.16	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	46
Tabel 3.17	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	47

Tabel 3.18 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	49
Tabel 3.19 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	50
Tabel 3.20 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2017	52
Tabel 3.21 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Tahun 2017	52
Tabel 3.22 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2017	54
Tabel 3.23 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	56
Tabel 3.24 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	57
Tabel 4.1 Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	60
Tabel 4.2 Angka Kelahiran Umum Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	61
Tabel 4.3 Rasio Anak dan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	62
Tabel 4.4 Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	63
Tabel 4.5 Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	64
Tabel 4.6 Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	65
Tabel 4.7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	66
Tabel 4.8 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	69
Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	69
Tabel 4.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	71
Tabel 4.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	71
Tabel 4.12 Tingkat Pengangguran Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	74

Tabel 4.13	Jumlah Penduduk penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	76
Tabel 5.1	Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	80
Tabel 5.2	Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2017	81
Tabel 5.3	Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	82
Tabel 5.4	Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2017	83
Tabel 5.5	Jumlah Migrasi Netto Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	84
Tabel 6.1	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	87
Tabel 6.2	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan KTP-el Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	88
Tabel 6.3	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017.....	89
Tabel 6.4	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Perkawinan/Surat Nikah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	91
Tabel 6.5	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2017	18
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	26
Gambar 3.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua.....	30
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Berusia ≥ 7 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	35
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hakekat pembangunan daerah adalah pembangunan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan yang ideal harus didasarkan pada potensi dan kondisi penduduk di daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mampu memberikan manfaat dan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu.

Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan penduduk baik potensi maupun kondisi penduduk itu sendiri, agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk baik fisik maupun non fisik. Atau dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik harus aspiratif terhadap data kependudukan dan memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam Pasal 49 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan.

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu

dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Pasaman Barat serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

B. Tujuan

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 ini disusun dengan memanfaatkan data registrasi yang dihasilkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sumber data lintas sektoral lainnya, yang bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan;
3. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan dan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan masalah kependudukan, maka ruang lingkup penyusunan perkembangan kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat ini meliputi perkembangan kependudukan Tahun 2017 dengan cakupan data antara lain :

1. Kuantitas penduduk, meliputi persebaran dan kepadatan penduduk; komposisi penduduk menurut karakteristik demografi; komposisi penduduk menurut karakteristik sosial; dan keluarga;

2. Kualitas penduduk meliputi kelahiran, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi netto;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Sumber Data

1. Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Data registrasi penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
3. Data dari lintas sektoral terkait;

E. Pengertian Umum

Dalam rangka memberikan kesamaan persepsi tentang beberapa istilah yang digunakan maka beberapa pengertian umum yang ada dalam penyusunan profil kependudukan ini adalah sebagai berikut :

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;
4. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
9. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Kematian atau Mortalitas Menurut WHO** adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
12. **Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
13. **Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk

non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;

14. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domilisinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
15. **Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
16. **Migrasi kembali (*return migration*)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
17. **Migrasi semasa hidup (*life time migration*)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
18. **Migrasi Risen (*recent migration*)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
19. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di Kabupaten dan atau proses perubahan suatu daerah pedesaan menjadi Kabupaten, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spesial dan/atau bertambahnya fasilitas Kabupaten, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
20. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;

21. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
22. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
23. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
24. **Tingkat partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
25. **Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
26. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
27. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
28. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

29. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
30. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
31. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
32. **Lahir hidup** adalah
 - a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
33. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
34. **Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
35. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
36. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;
37. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS

usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

38. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
39. **Pertumbuhan penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;
40. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
41. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
42. **Rasio jenis kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
43. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
44. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;

45. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
46. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;
47. **Angka Perkawinan umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menurut sejarahnya, nama Kabupaten Pasaman Barat diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman. Selain itu juga terdapat sebuah sungai yang bernama sungai Pasaman. Kata Pasaman sendiri berasal dari kata “Pasamoan” yang berarti kesepakatan atau kesamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman yaitu Minangkabau, Mandailing dan Jawa.

Sebenarnya secara kultural cukup banyak perbedaan antara Suku Minangkabau, Suku Mandailing dan Suku Jawa. Perbedaan ini dibidang adat istiadat, bahasa, sikap dan prilaku hidup. Namun dibalik perbedaan itu, banyak pula kesamaan visi dan persepsi sehingga masyarakat Pasaman Barat dapat hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian.

Setelah lebih dari setengah abad, akhirnya dengan adanya otonomi daerah Pasaman dimekarkan menjadi dua kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tersebut, Kabupaten Pasaman Barat (sebagai Kabupaten Pemekaran) resmi berpisah dari Kabupaten Pasaman (sebagai Kabupaten Induk) pada tanggal 7 Januari 2004, yang ditandai dengan pelantikan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Pasaman Barat.

Saat ini Kabupaten Pasaman Barat telah menjadi salah satu daerah, yang sebelumnya daerah terisolir, telah berubah menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dan menjadi “mutiara” di provinsi Sumatera Barat.

A. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas 3.887,77 km² atau setara dengan 9,21% dari luas total Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan secara geografis Kabupaten Pasaman Barat berada pada garis lintasan khatulistiwa (equator) antara 0^o33' Lintang Utara sampai dengan 0^o11' Lintang Selatan serta

Sedangkan secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Nagari. Adapun data yang lebih terperinci tentang administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat khususnya jumlah Kecamatan dan Nagari adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Sungai Beremas

Kecamatan Sungai Beremas memiliki luas wilayah 440,48 Km² atau 11,32% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 25,826 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Sungai Beremas adalah 59 jiwa/km². Kecamatan Sungai Beremas terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Aia Bangih.

2. Kecamatan Lembah Melintang

Kecamatan Lembah Melintang memiliki luas wilayah 263,77 Km² atau 6,78% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 48,431 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Lembah Melintang adalah 184 jiwa/km². Kecamatan Lembah Melintang terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Ujung Gading.

3. Kecamatan Pasaman

Kecamatan Pasaman memiliki luas wilayah 508,93 Km² atau 13,09% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 72.928 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Pasaman adalah 143 jiwa/km². Kecamatan Pasaman terdiri dari 3 (tiga) Nagari yaitu :

1. Nagari Lingkuang Aua
2. Nagari Aua Kuniang
3. Nagari Aia Gadang

4. Kecamatan Talamau

Kecamatan Talamau memiliki luas wilayah 324,24 Km² atau 8,34% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 30.534 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan

Talamau adalah 94 jiwa/km². Kecamatan Talamau terdiri dari 3 (tiga) Nagari yaitu :

1. Nagari Kajai
2. Nagari Talu
3. Nagari Sinuruik

5. Kecamatan Kinali

Kecamatan Kinali memiliki luas wilayah 482,64 Km² atau 12,41% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 69.991 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Kinali adalah 145 jiwa/km². Kecamatan Kinali terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

1. Nagari Kinali
2. Nagari Katiagan

6. Kecamatan Gunung Tuleh

Kecamatan Gunung Tuleh memiliki luas wilayah 453,97 Km² atau 11,67% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 24.141 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh adalah 53 jiwa/ km². Kecamatan Gunung Tuleh terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

1. Nagari Muaro Kiawai
2. Nagari Rabi Jonggor

7. Kecamatan Ranah Batahan

Kecamatan Ranah Batahan memiliki luas wilayah 354,88 Km² atau 9,12% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 26.436 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Ranah Batahan adalah 74 jiwa/ km². Kecamatan Ranah Batahan terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

1. Nagari Batahan
2. Nagari Desa Baru

8. Kecamatan Koto Balingka

Kecamatan Koto Balingka memiliki luas wilayah 340,78 Km² atau 8,76% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 29.806 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Koto Balingka adalah 87 jiwa/ km². Kecamatan Koto Balingka terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Parik.

9. Kecamatan Sungai Aur

Kecamatan Sungai Aur memiliki luas wilayah 420,16 Km² atau 10.8% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 37.329 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Sungai Aur adalah 89 jiwa/ km². Kecamatan Sungai Aur terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Sungai Aua.

10. Kecamatan Luhak Nan Duo

Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki luas wilayah 174,21 Km² atau 4,48% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 45.306 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Luhak Nan Duo adalah 260 jiwa/km². Kecamatan Luhak Nan Duo terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

1. Nagari Koto Baru
2. Nagari Kapa

11. Kecamatan Sasak Ranah Pesisir

Kecamatan Sasak Ranah Pesisir memiliki luas wilayah 123,71 Km² atau 3,18% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 15.663 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir adalah 127 jiwa/km². Kecamatan Sasak Ranah Pesisir terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Sasak.

B. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Pasaman Barat meliputi daerah datar, bergelombang, berbukit dan pegunungan. Perbukitan dan pegunungan terdapat pada sebagian besar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman di bagian timur dan Kabupaten Mandailing Natal di bagian utara. Wilayah topografi datar meliputi daerah Barat dari seluruh kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia yaitu Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie, Pasaman, Sungai Aua, Lembah Melintang, Koto Balingka dan Sungai Beremas.

Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.192 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.192 meter di atas permukaan laut.

Tanah Pasaman Barat yang subur terbentang dari utara ke selatan sangat cocok untuk pertanian dalam arti luas perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan, sehingga dengan kata lain dapat disebut sebagai pusat agro bisnis. Dengan berkembangnya agro bisnis tentunya melahirkan kegiatan agro industri.

BAB III KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota.

1. Persebaran Penduduk

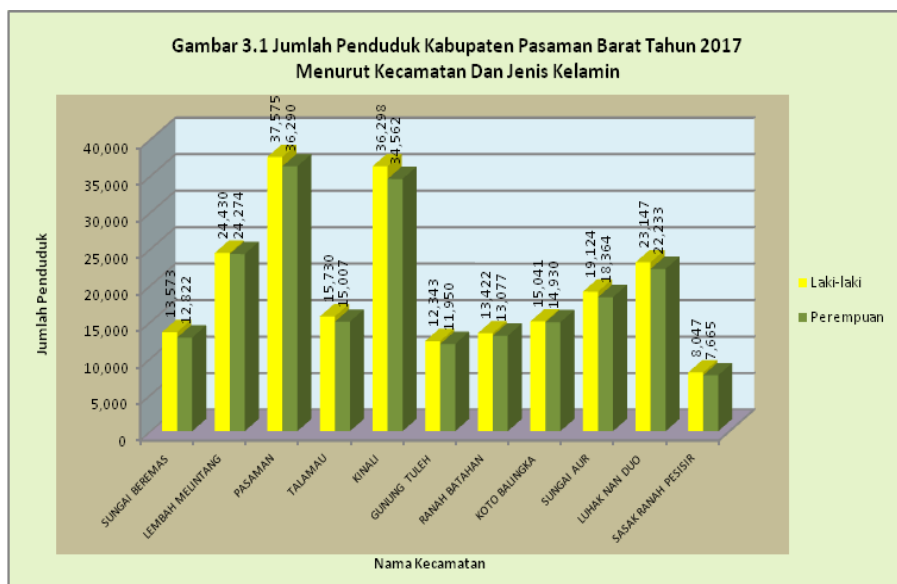
Persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Dapat pula dikatakan bahwa persebaran atau distribusi penduduk bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah tersebar merata atau tidak. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887.77 km² didiami penduduk sebanyak 429.904 jiwa, terdiri dari 218.730 jiwa laki-laki dan 211.174 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari persebaran penduduk di 11 (sebelas) kecamatan sepanjang tahun 2017, dapat dilihat bahwa distribusi jumlah penduduk pada tahun 2017 ini sebagian besar tinggal di Pasaman yakni 17,18%, Kecamatan Kinali yakni 16,48%, dan Kecamatan Lembah Melintang yakni 11,33%. Sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir yakni 3,65%.

Tabel 3.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	SUNGAI BEREMAS	13,573	3.16	12,822	2.98	26,395	6.14
2	LEMBAH MELINTANG	24,430	5.68	24,274	5.65	48,704	11.33
3	PASAMAN	37,575	8.74	36,290	8.44	73,865	17.18
4	TALAMAU	15,730	3.66	15,007	3.49	30,737	7.15
5	KINALI	36,298	8.44	34,562	8.04	70,860	16.48
6	GUNUNG TULEH	12,343	2.87	11,950	2.78	24,293	5.65
7	RANAH BATAHAN	13,422	3.12	13,077	3.04	26,499	6.16
8	KOTO BALINGKA	15,041	3.50	14,930	3.47	29,971	6.97
9	SUNGAI AUR	19,124	4.45	18,364	4.27	37,488	8.72
10	LUHAK NAN DUO	23,147	5.38	22,233	5.17	45,380	10.56
11	SASAK RANAH PESISIR	8,047	1.87	7,665	1.78	15,712	3.65
KABUPATEN PASAMAN BARAT		218,730	50.88	211,174	49.12	429,904	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah



Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan keruangan.

Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu. Untuk menghitung rasio kepadatan penduduk atau jumlah rata-rata penduduk setiap km² ini, digunakan rumus yaitu Jumlah Penduduk (jiwa) dibagi dengan Luas wilayah (km²) atau melalui rumus sebagai berikut :

$$D = \frac{P}{A}$$

D = Rasio Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
P = Jumlah Penduduk (jiwa)
A = Luas Wilayah (Km²)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau wilayah, antara lain :

1. Faktor fisiografis

Penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.

2. Faktor biologi

Tingkat pertumbuhan penduduk berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.

3. Faktor kebudayaan dan teknologi

Daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Berdasarkan tingkat kepadatan, Kabupaten Pasaman Barat tergolong Kabupaten yang tidak begitu padat penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah yang memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas 3.887,77 km², Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh 429.904 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 111 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh 111 jiwa.

Jika dilihat kepadatan penduduk per Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 260 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Lembah Melintang sebesar 185 jiwa/km² serta Kecamatan Kinali sebesar 147 jiwa/km².

Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN PENDUDUK
1	SUNGAI BEREMAS	440.48	26,395	60
2	LEMBAH MELINTANG	263.77	48,704	185
3	PASAMAN	508.93	73,865	145
4	TALAMAU	324.24	30,737	95
5	KINALI	482.64	70,860	147
6	GUNUNG TULEH	453.97	24,293	54
7	RANAH BATAHAN	354.88	26,499	75
8	KOTO BALINGKA	340.78	29,971	88
9	SUNGAI AUR	420.16	37,488	89
10	LUHAK NAN DUO	174.21	45,380	260
11	SASAK RANAH PESISIR	123.71	15,712	127
KABUPATEN PASAMAN BARAT		3,887.77	429,904	111

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk yang membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km²; kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km²; cukup padat 251 – 400 jiwa/ km²; dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km². maka Kabupaten Pasaman Barat tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat yaitu 111 jiwa/km².

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi netto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk) tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu *Fertilitas*, *Mortalitas*, dan *Migrasi* (*Masuk/inmigration* dan *keluar/outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*refroductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto (*net migration*).

Berdasarkan data tersebut, maka untuk menghitung jumlah penduduk dapat menggunakan rumus :

$$P_t = P_o + (B-D) = (M_i - M_o)$$

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah Penduduk pada tahun dasar (o)

B (*birth*) = Jumlah kelahiran selama periode $o-t$

D (*death*) = Jumlah kematian selama periode $o-t$

M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode $0-t$

M_o = Jumlah migrasi keluar selama periode $0-t$

Namun demikian, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI/AK).

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan.

Dengan menggunakan rumus perhitungan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

$$P_t = P_o \cdot e^{rt}$$

P_t : Jumlah Penduduk tahun t

P_o : Jumlah Penduduk pada tahun dasar/ awal (0)

r : Angka Pertumbuhan Penduduk

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

e : Fungsi eksponensial = 2,7182818

**Tabel 3.3 Angka Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Tahun 2016	Jumlah Penduduk Tahun 2017	Pertumbuhan Penduduk
1	SUNGAI BEREMAS	25,826	26,395	0.022
2	LEMBAH MELINTANG	48,431	48,704	0.006
3	PASAMAN	72,928	73,865	0.013
4	TALAMAU	30,534	30,737	0.007
5	KINALI	69,991	70,860	0.012
6	GUNUNG TULEH	24,141	24,293	0.006
7	RANAH BATAHAN	26,436	26,499	0.002
8	KOTO BALINGKA	29,806	29,971	0.006
9	SUNGAI AUR	37,329	37,488	0.004
10	LUHAK NAN DUO	45,306	45,380	0.002
11	SASAK RANAH PESISIR	15,663	15,712	0.003
KABUPATEN PASAMAN BARAT		426,391	429,904	0.008

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2016-2017 sebesar 0,008 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini tergolong masih rendah.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan

kesehatan dan lain-lain. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun yaitu sebanyak 68,92% dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-19 tahun, sisanya sebanyak 26,79% merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 4,30% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun berjumlah cukup besar yaitu lebih dari seperempat penduduk Kabupaten Pasaman Barat (26,79%). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Tabel 3.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

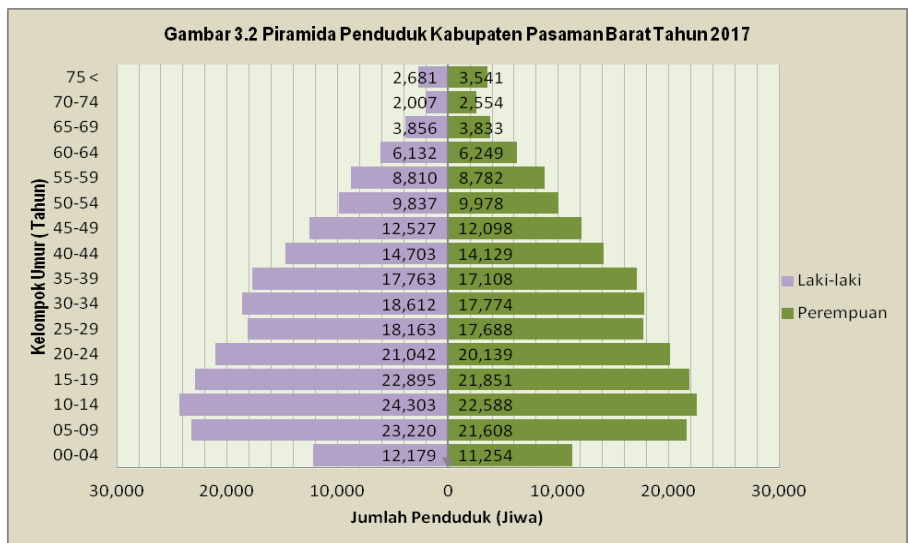
NO	KELOMPOK UMUR (Tahun)	Laki-Laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	00-04	12,179	2.83	11,254	2.62	23,433	5.45
2	05-09	23,220	5.40	21,608	5.03	44,828	10.43
3	10-14	24,303	5.65	22,588	5.25	46,891	10.91
4	15-19	22,895	5.33	21,851	5.08	44,746	10.41
5	20-24	21,042	4.89	20,139	4.68	41,181	9.58
6	25-29	18,163	4.22	17,688	4.11	35,851	8.34
7	30-34	18,612	4.33	17,774	4.13	36,386	8.46
8	35-39	17,763	4.13	17,108	3.98	34,871	8.11
9	40-44	14,703	3.42	14,129	3.29	28,832	6.71
10	45-49	12,527	2.91	12,098	2.81	24,625	5.73
11	50-54	9,837	2.29	9,978	2.32	19,815	4.61
12	55-59	8,810	2.05	8,782	2.04	17,592	4.09
13	60-64	6,132	1.43	6,249	1.45	12,381	2.88
14	65-69	3,856	0.90	3,833	0.89	7,689	1.79
15	70-74	2,007	0.47	2,554	0.59	4,561	1.06
16	75 <	2,681	0.62	3,541	0.82	6,222	1.45
J U M L A H		218,730	50.87	211,174	49.09	429,904	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 5,45% penduduk Kabupaten Pasaman Barat merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan. Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida

ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 00-04 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 05-09 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.



Pada piramida penduduk dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 10-19 tahun menunjukkan jumlah yang besar. Data ini harus menjadi perhatian khusus bagi Kabupaten Pasaman Barat karena usia 10-19 tahun merupakan usia remaja dimana kualitas penduduk dengan rentang usia tersebut sangat menentukan bagi masa depan suatu daerah kedepannya. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 4,30 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena

kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan menggunakan rumus hitung rasio jenis kelamin sebagai berikut :

$$RJK = \frac{\sum L}{\sum P} \times K$$

- RJK = Rasio Jenis Kelamin
 $\sum L$ = Jumlah Penduduk Laki-laki
 $\sum P$ = Jumlah Penduduk Perempuan
K = Konstanta = 100 penduduk perempuan

Maka gambaran penduduk Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan rasio jenis kelamin tersebut adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KELOMPOK UMUR (Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
1	00-04	12,179	11,254	23,433	108.22
2	05-09	23,220	21,608	44,828	107.46
3	10-14	24,303	22,588	46,891	107.59
4	15-19	22,895	21,851	44,746	104.78
5	20-24	21,042	20,139	41,181	104.48
6	25-29	18,163	17,688	35,851	102.69
7	30-34	18,612	17,774	36,386	104.71
8	35-39	17,763	17,108	34,871	103.83
9	40-44	14,703	14,129	28,832	104.06
10	45-49	12,527	12,098	24,625	103.55
11	50-54	9,837	9,978	19,815	98.59
12	55-59	8,810	8,782	17,592	100.32
13	60-64	6,132	6,249	12,381	98.13
14	65-69	3,856	3,833	7,689	100.60
15	70-74	2,007	2,554	4,561	78.58
16	75 >	2,681	3,541	6,222	75.71
J U M L A H		218,730	211,174	429,904	103.58

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dari tabel 3.5 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) di Kabupaten Pasaman Barat adalah 103,58 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Dari data mengenai gambaran rasio jenis kelamin Kabupaten Pasaman Barat tersebut, terdapat suatu keunikan dimana datanya berbeda dengan gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki, sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 5-14 tahun. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108,22 yang artinya terdapat 108-109 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara

biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 65 tahun menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki

3. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

- **Rasio Ketergantungan Muda** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.
- **Rasio Ketergantungan Tua** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun

Untuk menghitung Rasio Ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan rumus sebagai berikut :

$$RK_{\text{muda}} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100$$

$$RK_{\text{tua}} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

$$RK_{\text{total}} = \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}} \times 100$$

RK_{Total} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua

RK_{Muda} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda

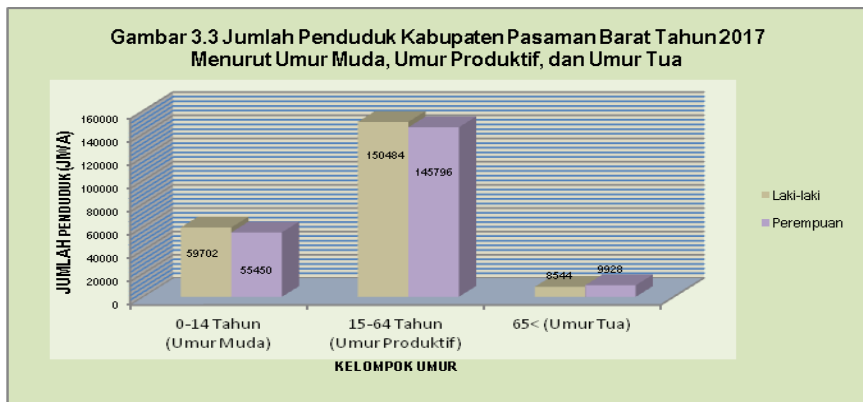
RK_{Tua} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua

$P_{(0-14)}$ = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

$P_{(65+)}$ = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 -65 tahun)

Jumlah penduduk menurut umur muda, umur produktif dan umur tua juga dapat ditampilkan dalam grafik berikut :



**Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat
Menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Tahun 2017**

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
1	0-14 Tahun (Umur Muda)	59,702	55,450	115,152	26.79
2	15-64 Tahun (Umur Produktif)	150,484	145,796	296,280	68.92
3	65< (Umur Tua)	8,544	9,928	18,472	4.30
JUMLAH		218,730	211,174	429,904	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rasio ketergantungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 RK_{\text{muda}} &= (115.152 / 296.280) \times 100 \\
 &= 38,87 \% \\
 RK_{\text{tua}} &= (18.472 / 296.280) \times 100 \\
 &= 6,23 \% \\
 RK_{\text{total}} &= ((115.152 + 18.472) / 296.280) \times 100 \\
 &= 45,10 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, didapat rasio ketergantungan total adalah sebesar 45,10 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45-46 orang (45,10%) yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 45,10 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 38,87 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 6,23 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk usia kerja di Kabupaten Pasaman Barat masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

Angka ini masih termasuk tinggi dimana ketergantungan penduduk usia muda masih besar. Dengan karakteristik penduduk muda, maka tidak terhindarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadapi beban besar dalam investasi sosial. Investasi sosial adalah kegiatan antara lain pengembangan sumber daya manusia dan untuk pemenuhan kebutuhan

pelayanan dasar bagi anak-anak dibawah 15 tahun. Karena bagaimanapun juga ditangan merekalah nantinya akan dilanjutkan tongkat estafet keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu, menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas penduduk.

C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Jumlah dan Proporsi penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel 3.7. Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa kualitas penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2017 relatif rendah. Lebih dari separuh penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang berusia diatas 7 tahun (60,27%) tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD atau hanya tamat SD. Persentase penduduk usia diatas 7 tahun yang tidak bersekolah lebih tinggi pada penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dan pada tingkat pendidikan belum tamat SD dan tamat SD, persentase penduduk laki-laki berusia diatas 7 tahun masih lebih besar dari pada penduduk perempuan.

Jika mengacu pada program Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan dasar adalah 9 tahun yaitu dari Sekolah Dasar sampai tingkat SLTP. Dengan begitu hanya kurang dari separuh (44,86%) penduduk Kabupaten Pasaman Barat berusia 7 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Kurang dari sepertiga penduduk Kabupaten Pasaman Barat (26,70%) tamat Sekolah Dasar/ sederajat. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP sebesar 18,16%. Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat diduga karena mata pencaharian utama mayoritas penduduk adalah sektor pertanian. Hal ini memengaruhi pola pikir bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk bekerja di sektor pertanian.

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat berusia >= 7 Tahun Tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	31,055	8.207	29,375	7.763	60,430	15.970
2	Tidak/Belum Tamat SD	32,317	8.541	30,874	8.159	63,191	16.700
3	Tamat SD/Sederajat	51,227	13.538	50,643	13.384	101,870	26.922
4	SLTP /Sederajat	35,658	9.424	33,847	8.945	69,505	18.369
5	SLTA/Sederajat	35,058	9.265	31,133	8.228	66,191	17.493
6	Diploma I/II	943	0.249	2,427	0.641	3,370	0.891
7	Diploma III/SM	1,256	0.332	2,543	0.672	3,799	1.004
8	Diploma IV/ S-1	4,300	1.136	5,408	1.429	9,708	2.566
9	Strata-II	207	0.055	116	0.031	323	0.085
10	Strata-III	5	0.001	0	0.000	5	0.001
JUMLAH		192,026	50.748	186,366	49.252	378,392	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk berusia diatas 7 tahun yang tamat SD untuk penduduk Laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk Perempuan. Hal ini juga pada jenjang

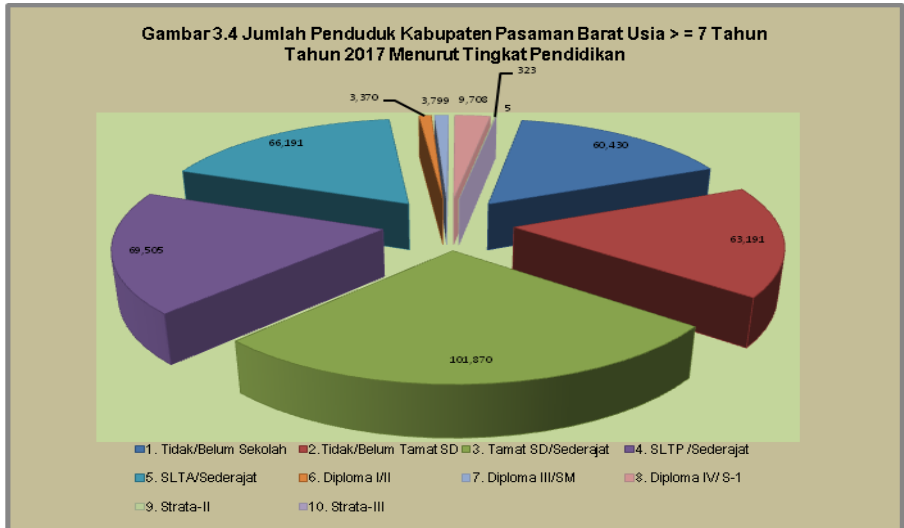
pendidikan SLTP, persentase penduduk laki-laki yang tamat SLTP lebih besar dari penduduk perempuan.

Pada jenjang pendidikan SLTA, persentase penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk perempuan lebih rendah (8,228%) daripada penduduk laki-laki (9,265%). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya. Hal ini sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, terutama pada kelompok penduduk miskin.

Berkaitan dengan rendahnya persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, untuk itu pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan penduduk usia sekolah yang tidak/belum bersekolah. Sebagaimana pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan kondisi tersebut mengingat bahwa era globalisasi sedang berlangsung dan persaingan semakin ketat dan berat. Oleh karena itu, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki ketrampilan khusus.

Jumlah penduduk berusia diatas 7 tahun menurut tingkat pendidikan juga dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut :



2. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Agama dan Kecamatan

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KEPERCAYAAN	JUMLAH
1	SUNGAI BEREMAS	26,063	309	23	0	0	0	26,395
2	LEMBAH MELINTANG	48,637	66	-	0	1	0	48,704
3	PASAMAN	72,472	1,222	148	2	1	20	73,865

4	TALAMAU	30,730	2	5	0	0	0	30,737
5	KINALI	68,600	1,440	814	1	0	5	70,860
6	GUNUNG TULEH	24,268	25	-	0	0	0	24,293
7	RANAH BATAHAN	26,482	17	-	0	0	0	26,499
8	KOTO BALINGKA	29,726	233	12	0	0	0	29,971
9	SUNGAI AUR	35,167	2,105	214	0	2	0	37,488
10	LUHAK NAN DUO	42,086	1,579	1,713	0	2	0	45,380
11	SASAK RANAH PESISIR	15,336	372	4	0	0	0	15,712
JUMLAH		419,567	7,370	2,933	3	6	25	429,904

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dikaitkan dengan wilayah kecamatan, maka Agama Islam mendominasi semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Dari keseluruhan kecamatan, Agama Islam paling banyak dianut penduduk yaitu sebanyak 97,60% disusul kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 1,71%, dan Katholik sebanyak 0,68%.

3. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

**Tabel 3.9 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017
Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan**

KECAMATAN	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Laki-laki (L)										
SUNGAI BEREMAS	8,161	1.90	5,299	1.23	31	0.01	82	0.02	13,573	3.16
LEMBAH MELINTANG	14,868	3.46	9,291	2.16	78	0.02	193	0.04	24,430	5.68
PASAMAN	20,286	4.72	16,860	3.92	159	0.04	270	0.06	37,575	8.74
TALAMAU	8,844	2.06	6,590	1.53	75	0.02	221	0.05	15,730	3.66
KINALI	19,632	4.57	16,292	3.79	117	0.03	257	0.06	36,298	8.44
GUNUNG TULEH	7,080	1.65	5,035	1.17	61	0.01	167	0.04	12,343	2.87
RANAH BATAHAN	7,628	1.77	5,600	1.30	45	0.01	149	0.03	13,422	3.12
KOTO BALINGKA	8,766	2.04	6,093	1.42	55	0.01	127	0.03	15,041	3.50
SUNGAI AUR	11,210	2.61	7,662	1.78	76	0.02	176	0.04	19,124	4.45
LUHAK NAN DUO	12,360	2.88	10,510	2.44	84	0.02	193	0.04	23,147	5.38
SASAK RANAH PESISIR	4,394	1.02	3,549	0.83	24	0.01	80	0.02	8,047	1.87
JUMLAH	123,229	28.66	92,781	21.58	805	0.19	1,915	0.45	218,730	50.88
Perempuan (P)										
SUNGAI BEREMAS	6,661	1.55	5,338	1.24	144	0.03	679	0.16	12,822	2.98
LEMBAH MELINTANG	12,928	3.01	9,310	2.17	414	0.10	1,622	0.38	24,274	5.65
PASAMAN	16,746	3.90	16,755	3.90	687	0.16	2,102	0.49	36,290	8.44
TALAMAU	6,943	1.62	6,537	1.52	245	0.06	1,282	0.30	15,007	3.49
KINALI	16,110	3.75	16,366	3.81	375	0.09	1,711	0.40	34,562	8.04
GUNUNG TULEH	5,773	1.34	5,019	1.17	190	0.04	968	0.23	11,950	2.78
RANAH BATAHAN	6,418	1.49	5,581	1.30	189	0.04	889	0.21	13,077	3.04
KOTO BALINGKA	7,659	1.78	6,123	1.42	229	0.05	919	0.21	14,930	3.47
SUNGAI AUR	9,251	2.15	7,659	1.78	297	0.07	1,157	0.27	18,364	4.27
LUHAK NAN DUO	10,148	2.36	10,399	2.42	326	0.08	1,360	0.32	22,233	5.17
SASAK RANAH PESISIR	3,629	0.84	3,486	0.81	113	0.03	437	0.10	7,665	1.78
JUMLAH	102,266	23.79	92,573	21.53	3,209	0.75	13,126	3.05	211,174	49.12
Laki-laki + Perempuan										
SUNGAI BEREMAS	14,822	3.45	10,637	2.47	175	0.04	761	0.18	26,395	6.14
LEMBAH MELINTANG	27,796	6.47	18,601	4.33	492	0.11	1,815	0.42	48,704	11.33
PASAMAN	37,032	8.61	33,615	7.82	846	0.20	2,372	0.55	73,865	17.18
TALAMAU	15,787	3.67	13,127	3.05	320	0.07	1,503	0.35	30,737	7.15
KINALI	35,742	8.31	32,658	7.60	492	0.11	1,968	0.46	70,860	16.48
GUNUNG TULEH	12,853	2.99	10,054	2.34	251	0.06	1,135	0.26	24,293	5.65
RANAH BATAHAN	14,046	3.27	11,181	2.60	234	0.05	1,038	0.24	26,499	6.16
KOTO BALINGKA	16,425	3.82	12,216	2.84	284	0.07	1,046	0.24	29,971	6.97
SUNGAI AUR	20,461	4.76	15,321	3.56	373	0.09	1,333	0.31	37,488	8.72
LUHAK NAN DUO	22,508	5.24	20,909	4.86	410	0.10	1,553	0.36	45,380	10.56
SASAK RANAH PESISIR	8,023	1.87	7,035	1.64	137	0.03	517	0.12	15,712	3.65
TOTAL	225,495	52.45	185,354	43.12	4,014	0.93	15,041	3.50	429,904	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin yakni 52,45 persen. Untuk penduduk berstatus kawin, proporsi penduduk perempuan yang berstatus kawin lebih kecil dibandingkan Laki-laki. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai, bahwa persentase penduduk berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar pada penduduk perempuan dibanding dengan penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

Disamping itu, pada status cerai hidup, proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

NO	KELOMPOK UMUR	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	00-04	22,902	5.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	22,902	5.33
2	05-09	44,687	10.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	44,687	10.39
3	10-14	46,840	10.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	46,840	10.90
4	15-19	44,544	10.36	302	0.07	0	0.00	4	0.00	44,850	10.43
5	20-24	35,530	8.26	5,605	1.30	30	0.01	14	0.00	41,179	9.58
6	25-29	18,152	4.22	17,548	4.08	141	0.03	63	0.01	35,904	8.35
7	30-34	7,515	1.75	28,358	6.60	319	0.07	181	0.04	36,373	8.46
8	35-39	3,047	0.71	31,079	7.23	457	0.11	378	0.09	34,961	8.13
9	40-44	1,107	0.26	26,683	6.21	535	0.12	584	0.14	28,909	6.72
10	45-49	531	0.12	22,650	5.27	545	0.13	971	0.23	24,697	5.74

11	50-54	233	0.05	17,638	4.10	530	0.12	1,461	0.34	19,862	4.62
12	55-59	154	0.04	14,845	3.45	575	0.13	2,106	0.49	17,680	4.11
13	60-64	87	0.02	9,636	2.24	392	0.09	2,311	0.54	12,426	2.89
14	65-69	63	0.01	5,415	1.26	230	0.05	2,083	0.48	7,791	1.81
15	70-74	36	0.01	2,722	0.63	103	0.02	1,711	0.40	4,572	1.06
16	> 75	67	0.02	2,873	0.67	157	0.04	3,174	0.74	6,271	1.46
TOTAL		225,495	52.45	185,354	43.12	4,014	0.93	15,041	3.50	429,904	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dikaitkan dengan kelompok umur, pada tabel 3.10 terlihat bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin berada pada kelompok umur 10-14 tahun, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada kelompok umur 55-59 tahun, sedangkan penduduk berstatus cerai mati lebih banyak berada pada kelompok umur 60-64 tahun.

Tabel 3.10 juga menunjukkan adanya penduduk usia muda (15-19 Tahun) yang sudah berstatus kawin yang jumlahnya 302 orang. Sedangkan pada kelompok umur 20-24 tahun penduduk yang berstatus kawin sebanyak 5.605, cerai hidup 30 orang, dan cerai mati 14 orang. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang berkaitan masalah kehamilan, persalinan dan paska melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan KB.

Menarik untuk diperhatikan, pada data yang ditampilkan oleh tabel 3.11 menunjukkan bahwa dari 142 orang penduduk dengan kelompok usia 15-19 tahun yang berstatus kawin, 132 diantaranya perempuan dan 10 orang laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur yang sama, penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang cenderung lebih cepat menikah adalah perempuan. Hal ini terjadi karena mungkin pemikiran dari sebagian masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, masih berpendapat

bahwa perempuan kodratnya adalah menjadi istri sehingga menjadi tabu bagi seorang perempuan untuk tidak segera menikah jika usianya sudah dipandang cukup. Atau mungkin juga dikarenakan masih ada yang beranggapan bahwa jika seorang perempuan tidak segera menikah pada rentang usia 15-19 tahun, maka dikhawatirkan akan sulit untuk mendapatkan jodoh diatas umur tersebut.

Tabel 3.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan

NO	KELOMPOK UMUR	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L		P	
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	00-04	13,075	12,164	0	0	0	0	0	0	13,075	3.04	12,164	2.83
2	05-09	23,366	21,619	0	0	0	0	0	0	23,366	5.44	21,619	5.03
3	10-14	24,444	22,819	0	0	0	0	0	0	24,444	5.69	22,819	5.31
4	15-19	22,606	21,220	26	348	0	0	1	3	22,633	5.26	21,571	5.02
2	20-24	19,639	15,254	1,368	4,821	3	29	3	13	21,013	4.89	20,117	4.68
4	25-29	11,426	5,707	6,609	11,659	25	132	5	66	18,065	4.20	17,564	4.09
5	30-34	5,256	1,852	13,275	15,554	71	253	27	165	18,629	4.33	17,824	4.15
5	35-39	2,070	769	15,340	15,447	117	342	50	328	17,577	4.09	16,886	3.93
3	40-44	751	334	13,759	12,834	127	410	74	540	14,711	3.42	14,118	3.28
6	45-49	294	209	11,899	10,481	119	425	119	870	12,431	2.89	11,985	2.79
7	50-54	130	94	9,322	8,073	100	444	175	1,317	9,727	2.26	9,928	2.31
6	55-59	75	74	8,316	6,292	97	474	266	1,855	8,754	2.04	8,695	2.02
4	60-64	47	39	5,585	3,773	66	309	281	2,029	5,979	1.39	6,150	1.43
8	65-69	17	44	3,458	1,711	35	182	238	1,818	3,748	0.87	3,755	0.87
9	70-74	14	21	1,750	907	17	88	197	1,505	1,978	0.46	2,521	0.59
7	> 75	19	47	2,074	673	28	121	479	2,617	2,600	0.60	3,458	0.80
JUMLAH		123,229	102,266	92,781	92,573	805	3,209	1,915	13,126	218,730	50.88	211,174	49.12

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Pada penduduk dengan kelompok umur 20-24 tahun, 32 orang penduduk yang berstatus cerai hidup, 29 orang diantaranya adalah perempuan dan 3 orang laki-laki. Masih pada kelompok umur yang sama, 16 orang penduduk dengan status cerai mati, 13 orang diantara adalah perempuan dan 3 orang laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian

maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

4. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage-SMAM*)

Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

**Tabel 3.12 Rata-rata Usia Kawin Pertama
Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama	
		Perempuan	Laki-laki
1	SUNGAI BEREMAS	26	30
2	LEMBAH MELINTANG	28	31
3	PASAMAN	26	30
4	TALAMAU	27	32
5	KINALI	26	30
6	GUNUNG TULEH	27	31
7	RANAH BATAHAN	28	32
8	KOTO BALINGKA	27	31
9	SUNGAI AUR	27	31
10	LUHAK NAN DUO	26	30
11	SASAK RANAH PESISIR	27	31
RATA-RATA KAB. PASAMAN BARAT		27	31

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 adalah 27, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kawin pertama penduduk perempuan nasional yang

mencapai 22,3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kabupaten Pasaman Barat telah menunda umur kawin pertama mereka, karena diduga mereka lebih banyak mengikuti pendidikan dan terjun ke pasar kerja.

Sedangkan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki Kabupaten Pasaman Barat adalah 31 tahun. Angka ini juga lebih tinggi dari rata-rata kawin pertama penduduk laki-laki nasional yang mencapai 25,7 tahun.

5. Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan kasar ini berguna untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan.

Angka perkawinan kasar di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Angka Perkawinan Kasar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Perkawinan	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2017	Angka Perkawinan Kasar
1	SUNGAI BEREMAS	218	26,283	8.29
2	LEMBAH MELINTANG	430	48,636	8.84
3	PASAMAN	566	73,540	7.70
4	TALAMAU	294	30,741	9.56
5	KINALI	535	70,504	7.59
6	GUNUNG TULEH	212	24,213	8.76
7	RANAH BATAHAN	251	26,431	9.50
8	KOTO BALINGKA	313	29,893	10.47
9	SUNGAI AUR	261	37,439	6.97
10	LUHAK NAN DUO	365	45,302	8.06
11	SASAK RANAH PESISIR	171	15,659	10.92
TOTAL		3,616	428,641	8.44

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat

6. Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk berusia di atas 15 tahun pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan umum merupakan indikator yang lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungannya hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Tabel 3.14. Angka Perkawinan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Perkawinan	Jumlah Penduduk Usia >=15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2017	Angka Perkawinan Umum
1	SUNGAI BEREMAS	218	18,170	12.00
2	LEMBAH MELINTANG	430	34,091	12.61
3	PASAMAN	566	52,657	10.75
4	TALAMAU	294	23,120	12.72
5	KINALI	535	50,447	10.61
6	GUNUNG TULEH	212	17,460	12.14
7	RANAH BATAHAN	251	19,281	13.02
8	KOTO BALINGKA	313	21,211	14.76
9	SUNGAI AUR	261	26,442	9.87
10	LUHAK NAN DUO	365	32,957	11.08
11	SASAK RANAH PESISIR	171	11,579	14.77
TOTAL		3,616	307,415	11.76

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 3.14 memperlihatkan bahwa angka perkawinan umum di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 11,76 yang berarti dari 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 terjadi kurang lebih 11 - 12 perkawinan. Angka perkawinan umum tertinggi terjadi di Kecamatan Koto Balingka sebesar 14,76 yang berarti dari 1.000 penduduk 15 tahun ke atas di Kecamatan Koto Balingka pada Tahun 2017

terjadi 14 sampai 15 perkawinan dan angka perkawinan umum terendah terjadi di Kecamatan Sungai Aur.

D. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

1. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

**Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017
Menurut Jenis Kelamin dan Status Hubungan Dalam Keluarga**

NO	Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Kepala Keluarga	95,251	22.16	15,925	3.70	111,176	25.86
2	Suami	9	0.00	0	0.00	9	0.00
3	Istri	0	0.00	90,270	21.00	90,270	21.00
4	Anak	119,557	27.81	100,461	23.37	220,018	51.18
5	Menantu	22	0.01	17	0.00	39	0.01
6	Cucu	633	0.15	538	0.13	1,171	0.27
7	Orang Tua	198	0.05	1,243	0.29	1,441	0.34
8	Mertua	159	0.04	1,135	0.26	1,294	0.30
9	Famili Lain	2,835	0.66	1,517	0.35	4,352	1.01
10	Pembantu	11	0.00	10	0.00	21	0.00
11	Lainnya	57	0.01	56	0.01	113	0.03
TOTAL		218,732	50.88	211,172	49.12	429,904	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah.

Pada tabel terlihat bahwa Kepala Keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/istri, yakni dari total 95.251 Kepala Keluarga laki-laki memiliki pasangan hidup (isteri) sebanyak 90.270 istri, tetapi dari total 15.925 Kepala Keluarga perempuan hanya 9 dari penduduk tersebut yang bersuami.

Ini menunjukkan banyaknya kepala keluarga perempuan yang tidak memiliki suami, bisa saja pasangan hidupnya sudah meninggal atau bercerai. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu, dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 1.96 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kabupaten Pasaman Barat jumlahnya relatif kecil.

2. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 111.176 keluarga yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Kecamatan Pasaman memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 19.740 keluarga (17,76%) kemudian disusul oleh kecamatan Kinali sebanyak 18.560 keluarga (16,69%) dan Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 12.290 keluarga (11,05%).

Dari tabel 3.16 terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3,87 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 sampai 4 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 3 sampai 4 orang per keluarga.

**Tabel 3.16 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk		Jumlah Keluarga		Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
		n (Jiwa)	%	n (KK)	%	
1	SUNGGAI BEREMAS	26,395	6.14	6,341	5.70	4.16
2	LEMBAH MELINTANG	48,704	11.33	11,629	10.46	4.19
3	PASAMAN	73,865	17.18	19,740	17.76	3.74
4	TALAMAU	30,737	7.15	8,024	7.22	3.83
5	KINALI	70,860	16.48	18,560	16.69	3.82
6	GUNUNG TULEH	24,293	5.65	6,354	5.72	3.82
7	RANAH BATAHAN	26,499	6.16	6,936	6.24	3.82
8	KOTO BALINGKA	29,971	6.97	7,517	6.76	3.99
9	SUNGGAI AUR	37,488	8.72	9,628	8.66	3.89
10	LUHAK NAN DUO	45,380	10.56	12,290	11.05	3.69
11	SASAK RANAH PESISIR	15,712	3.65	4,157	3.74	3.78
TOTAL		429,904	100	111,176	100	3.87

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan dapat digunakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat

memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3 sampai 4 orang.

3. Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

a. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tabel 3.17 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	SUNGAI BEREMAS	5,429	4.88	912	0.82	6,341	5.70
2	LEMBAH MELINTANG	9,569	8.61	2,060	1.85	11,629	10.46
3	PASAMAN	17,208	15.48	2,532	2.28	19,740	17.76
4	TALAMAU	6,774	6.09	1,250	1.12	8,024	7.22
5	KINALI	16,453	14.80	2,107	1.90	18,560	16.69
6	GUNUNGTULEH	5,245	4.72	1,109	1.00	6,354	5.72
7	RANAH BATAHAN	5,824	5.24	1,112	1.00	6,936	6.24
8	KOTO BALINGKA	6,285	5.65	1,232	1.11	7,517	6.76
9	SUNGAIAUR	8,072	7.26	1,556	1.40	9,628	8.66
10	LUHAK NAN DUO	10,758	9.68	1,532	1.38	12,290	11.05
11	SASAK RANAH PESISIR	3,634	3.27	523	0.47	4,157	3.74
TOTAL		95,251	85.68	15,925	14.32	111,176	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 3.17 menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat adalah laki-laki yaitu 95.251 orang (85,68%), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 15.925 orang (14.32%).

Dari tabel 3.17 terlihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Selain itu, penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang.

b. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut kelompok umur, maka tabel 3.18 menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Pasaman Barat dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-44 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Tabel 3.18 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
1	15-19	43	0.04	42	0.04	85	0.08
2	20-24	1,452	1.31	120	0.11	1,572	1.41
3	25-29	6,792	6.11	383	0.34	7,175	6.45
4	30-34	13,489	12.13	646	0.58	14,135	12.71
5	35-39	15,516	13.96	929	0.84	16,445	14.79
6	40-44	13,938	12.54	1,137	1.02	15,075	13.56
7	45-49	12,085	10.87	1,485	1.34	13,570	12.21
8	50-54	9,557	8.60	1,872	1.68	11,429	10.28
9	55-59	8,606	7.74	2,333	2.10	10,939	9.84
10	60-64	5,864	5.27	2,173	1.95	8,037	7.23
11	65-69	3,642	3.28	1,709	1.54	5,351	4.81
12	70-74	1,900	1.71	1,271	1.14	3,171	2.85
13	75-<	2,367	2.13	1,825	1.64	4,192	3.77
JUMLAH		95,251	85.68	15,925	14.32	111,176	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dan apabila dikaitkan dengan jenis kelamin, tabel 3.18 juga menunjukkan bahwa mayoritas Kepala Keluarga laki-laki berada di kelompok umur 30-44 tahun, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 50-64 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 3,77 persen, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Pasaman Barat.

c. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

Pada umumnya kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat berstatus kawin (85,68%). Disamping itu, terlihat pula pada tabel 3.19 adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 1,21 persen. Namun hal ini perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau hanya hidup sendirian. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Tabel 3.19 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kab. Pasaman Barat tahun 2017 Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		KEPALA KELUARGA	
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
1	BELUM KAWIN	914	0.82	436	0.39	1,350	1.21
2	KAWIN	92,184	82.92	1,910	1.72	94,094	84.64
3	CERAI HIDUP	596	0.54	2,832	2.55	3,428	3.08
4	CERAI MATI	1,557	1.40	10,747	9.67	12,304	11.07
JUMLAH		95,251	85.68	15,925	14.32	111,176	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 3.19 menunjukkan data bahwa persentase kepala keluarga dengan status cerai hidup lebih besar pada kepala keluarga berjenis kelamin perempuan (2,55 %) dibanding dengan kepala keluarga laki-laki (0,54 %). Hal ini terjadi karena biasanya laki-laki yang berpisah dari istrinya, baik karena bercerai maupun karena ditinggal istri yang meninggal, lebih cepat untuk memulai hubungan yang baru dan memutuskan untuk menikah kembali jika dibandingkan dengan perempuan.

Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi

tanggungjawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu persentase perempuan kepala keluarga sebesar 14,32 persen diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

d. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3.20 terlihat bahwa kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 30-44 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar berada pada kelompok umur 20-39 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 40-59 tahun, serta kepala keluarga berstatus cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

Tabel 3.20 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2017

NO	KLP. UMUR	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	10-14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	15-19	45	0.04	39	0.04	0	0.00	1	0.00	85	0.08
3	20-24	139	0.13	1,395	1.25	24	0.02	14	0.01	1,572	1.41
4	25-29	282	0.25	6,697	6.02	130	0.12	66	0.06	7,175	6.45
5	30-34	270	0.24	13,417	12.07	266	0.24	182	0.16	14,135	12.71
6	35-39	175	0.16	15,510	13.95	401	0.36	359	0.32	16,445	14.79
7	40-44	131	0.12	13,913	12.51	452	0.41	579	0.52	15,075	13.56
8	45-49	94	0.08	12,053	10.84	476	0.43	947	0.85	13,570	12.21
9	50-54	59	0.05	9,481	8.53	482	0.43	1,407	1.27	11,429	10.28
10	55-59	59	0.05	8,450	7.60	501	0.45	1,929	1.74	10,939	9.84
11	60-64	34	0.03	5,702	5.13	331	0.30	1,970	1.77	8,037	7.23
12	65-69	20	0.02	3,528	3.17	175	0.16	1,628	1.46	5,351	4.81
13	70-74	18	0.02	1,807	1.63	87	0.08	1,259	1.13	3,171	2.85
14	> 75	24	0.02	2,102	1.89	103	0.09	1,963	1.77	4,192	3.77
TOTAL		1,350	1.21	94,094	84.64	3,428	3.08	12,304	11.07	111,176	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

e. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

Dari tabel 3.21 diperoleh gambaran proporsi tertinggi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin berada pada kelompok umur 30-49 tahun, sedangkan proporsi kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin berada pada kelompok umur 30-54 tahun. Untuk kepala keluarga dengan status cerai hidup tertinggi, kepala keluarga laki-laki maupun perempuan terletak pada kelompok umur yang sama 35-59.

Tabel 3.21 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	UMUR	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	10-14	4	5	0	0	0	0	0	0	4	5
2	15-19	17	19	22	17	0	0	0	1	39	37
3	20-24	100	39	1,349	46	2	22	1	13	1,452	120
4	25-29	204	78	6,564	133	19	111	5	61	6,792	383
5	30-34	209	61	13,203	214	53	213	24	158	13,489	646
6	35-39	122	53	15,262	248	88	313	44	315	15,516	929
7	40-44	93	38	13,692	221	87	365	66	513	13,938	1,137
8	45-49	58	36	11,838	215	86	390	103	844	12,085	1,485

9	50-54	38	21	9,275	206	77	405	167	1,240	9,557	1,872
10	55-59	29	30	8,264	186	73	428	240	1,689	8,606	2,333
11	60-64	18	16	5,554	148	51	280	241	1,729	5,864	2,173
12	65-69	7	13	3,419	109	26	149	190	1,438	3,642	1,709
13	70-74	7	11	1,721	86	14	73	158	1,101	1,900	1,271
14	75-<	8	16	2,021	81	20	83	318	1,645	2,367	1,825
TOTAL		914	436	92,184	1,910	596	2,832	1,557	10,747	95,251	15,925

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Data yang sama ditunjukkan pada kelompok umur tertinggi kepala keluarga berstatus cerai mati, yaitu terletak pada kelompok umur 50-69 tahun baik pada kepala keluarga laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya dari tabel 3.21 nampak bahwa perempuan menjadi kepala keluarga tertinggi berada pada usia 55 keatas, dan diduga kepala keluarga perempuan tersebut memang telah berstatus cerai mati ataupun cerai hidup yang mengharuskan mereka menjadi kepala keluarga. Kondisi ini perlu perhatian lebih lanjut, karena keluarga yang dikepalai perempuan biasanya mempunyai status ekonomi yang rendah, karena perempuan pada umur yang lanjut, biasanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga rendah. Untuk kebutuhan pemberdayaan terhadap keluarga-keluarga tersebut perlu perhatian khusus, apakah anggota keluarganya berstatus bekerja atau tidak bekerja.

Disamping itu, dalam hal intervensi kemiskinan, data keluarga ini juga dibutuhkan karena kemiskinan individu berasal dari kemiskinan keluarga. Oleh sebab itu untuk menangani kemiskinan, unit yang harus diperhatikan adalah unit keluarga atau dengan kata lain melakukan pemberdayaan keluarga, dimana seluruh potensi anggota keluarga harus ditingkatkan.

f. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Jenjang pendidikan yang dicapai kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.

Tabel 3.22 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kab. Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN				KEPALA KELUARGA	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2,017	1.81	1,356	1.22	3,373	3.03
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	4,455	4.01	1,751	1.57	6,206	5.58
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	35,743	32.15	8,058	7.25	43,801	39.40
4	SLTP/SEDERAJAT	21,877	19.68	2,308	2.08	24,185	21.75
5	SLTA/SEDERAJAT	25,366	22.82	1,964	1.77	27,330	24.58
6	DIPLOMA I/II	806	0.72	161	0.14	967	0.87
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	1,069	0.96	92	0.08	1,161	1.04
8	DIPLOMA IV/STRATA I	3,724	3.35	231	0.21	3,955	3.56
9	STRATA-II	191	0.17	4	0.00	195	0.18
10	STRATA-III	3	0.00	0	0.00	3	0.00
.JUMLAH		95,251	85.68	15,925	14.32	111,176	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dari tabel 3.22, terlihat bahwa kualitas kepala keluarga Kabupaten Pasaman Barat menurut tingkat pendidikan formal yang ditamatkan pada tahun 2017 relatif rendah. Sebagian besar kepala keluarga baru menamatkan sekolah SD (39,40%), tidak sekolah sebanyak 3,03 persen dan tidak tamat SD sebanyak 5,58 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, kepala keluarga yang tamat SD/ sederajat lebih banyak terdapat pada

kepala keluarga laki-laki dibandingkan dengan perempuan, perbandingannya kira-kira 4:1. Demikian pula kepala keluarga yang tidak sekolah maupun tidak tamat SD/ sederajat lebih banyak didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Dari analisa data diatas, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan. Selain itu, kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja disektor informal.

Melihat kondisi pendidikan kepala keluarga di atas, maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus memberikan perhatian serius. Karena proses globalisasi yang sedang berlangsung, maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu meningkatkan pendidikan penduduknya agar mempunyai daya saing global.

g. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3.23. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kab. Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin

NO	JENIS PEKERJAAN	JENS KELAMIN				KEPALA KELUARGA	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
1	Belum/Tidak Bekerja	408	0.37	466	0.42	874	0.79
2	Bekerja	93,934	84.49	8,519	7.66	102,453	92.15
3	Mengurus Rumah Tangga	119	0.11	6,743	6.07	6,862	6.17
4	Pelajar/Mahasiswa	183	0.16	85	0.08	268	0.24
5	Pensiunan	607	0.55	112	0.10	719	0.65
TOTAL		95,251	85.68	15,925	14.32	111,176	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 3.23 menunjukkan kegiatan ekonomi dari 92,15 persen kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat berstatus bekerja. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja (84,49%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (7,66%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Untuk kepala keluarga dengan pekerjaan mengurus rumah tangga, terlihat bahwa hanya kepala keluarga perempuan yang bekerja mengurus rumah tangga, sementara kepala keluarga laki-laki tidak ada yang bekerja mengurus rumah tangga. Sedangkan kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 0,65 persen dimana jumlah kepala keluarga laki-laki yang pensiun (0,55%) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga perempuan yang pensiun (0,10%). Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja yakni 0,79 persen dan kepala keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa 0,24 persen.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka sangat kecil. Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah. Karena bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diduga mereka tidak mempunyai penghasilan, sehingga pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

h. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Sementara dilihat dari jenis pekerjaan kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat, hampir separuh (49,919%) bekerja sebagai petani/pekebun; 16,574 persen wiraswasta; 6,172 persen mengurus rumah tangga, dan 9,256 persen karyawan swasta.

Tabel 3.24. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin

NO	JENIS PEKERJAAN	JENS KELAMIN				KEPALA KELUARGA	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
1	BELUM TIDAK BEKERJA	408	0.367	466	0.419	874	0.786
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	119	0.107	6,743	6.065	6,862	6.172
3	PELAJAR MAHASISWA	183	0.165	85	0.076	268	0.241
4	PENSIUNAN	607	0.546	112	0.101	719	0.647
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2,194	1.973	267	0.240	2,461	2.214
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	170	0.153	1	0.001	171	0.154
7	KEPOLISIAN RI	418	0.376	0	0.000	418	0.376
8	PERDAGANGAN	1,550	1.394	163	0.147	1,713	1.541
9	PETANI PEKEBUN	48,594	43.709	6,904	6.210	55,498	49.919
10	PETERNAK	27	0.024	1	0.001	28	0.025
11	NELAYAN PERIKANAN	4,210	3.787	14	0.013	4,224	3.799
12	INDUSTRI	11	0.010	1	0.001	12	0.011
13	KONSTRUKSI	41	0.037	0	0.000	41	0.037
14	TRANSPORTASI	82	0.074	0	0.000	82	0.074

15	KARYAWAN SWASTA	10,069	9,057	221	0,199	10,290	9,256
16	KARYAWAN BUMN	577	0,519	15	0,013	592	0,532
17	KARYAWAN BUMD	43	0,039	0	0,000	43	0,039
18	KARYAWAN HONORER	790	0,711	47	0,042	837	0,753
19	BURUH HARIAN LEPAS	756	0,680	37	0,033	793	0,713
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	2,028	1,824	189	0,170	2,217	1,994
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	155	0,139	6	0,005	161	0,145
22	BURUH PETERNAKAN	19	0,017	0	0,000	19	0,017
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,001	9	0,008	10	0,009
24	TUKANG CUKUR	24	0,022	0	0,000	24	0,022
25	TUKANG LISTRIK	24	0,022	0	0,000	24	0,022
26	TUKANG BATU	145	0,130	0	0,000	145	0,130
27	TUKANG KAYU	304	0,273	1	0,001	305	0,274
28	TUKANG SOL SEPATU	1	0,001	0	0,000	1	0,001
29	TUKANG LAS PANDAI BESI	60	0,054	0	0,000	60	0,054
30	TUKANG JAHIT	56	0,050	13	0,012	69	0,062
31	TUKANG GIGI	3	0,003	0	0,000	3	0,003
32	PENATA RIAS	0	0,000	2	0,002	2	0,002
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
34	PENATA RAMBUT	14	0,013	1	0,001	15	0,013
35	MEKANIK	170	0,153	0	0,000	170	0,153
36	SENIMAN	9	0,008	0	0,000	9	0,008
37	TABIB	4	0,004	0	0,000	4	0,004
38	PARAJI	3	0,003	0	0,000	3	0,003
39	PERANCANG BUSANA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
40	PENTERJEMAH	1	0,001	0	0,000	1	0,001
41	IMAM MESJID	14	0,013	0	0,000	14	0,013
42	PENDETA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
43	PASTOR	1	0,001	0	0,000	1	0,001
44	WARTAWAN	24	0,022	1	0,001	25	0,022
45	USTADZ / MUBALIGH	33	0,030	0	0,000	33	0,030
46	ANGGOTA DPR RI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
47	ANGGOTA DPD	2	0,002	0	0,000	2	0,002
48	ANGGOTA BPK	1	0,001	0	0,000	1	0,001
49	DUTA BESAR	1	0,001	0	0,000	1	0,001
50	BUPATI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
51	WAKIL BUPATI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
52	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
53	ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA	28	0,025	0	0,000	28	0,025
54	DOSEN	22	0,020	1	0,001	23	0,021
55	GURU	579	0,521	102	0,092	681	0,613
56	PENGACARA	6	0,005	0	0,000	6	0,005
57	NOTARIS	4	0,004	0	0,000	4	0,004
58	ARSITEK	4	0,004	0	0,000	4	0,004
59	KONSULTAN	16	0,014	0	0,000	16	0,014
60	DOKTER	18	0,016	1	0,001	19	0,017
61	BIDAN	0	0,000	14	0,013	14	0,013
62	PERAWAT	38	0,034	8	0,007	46	0,041
63	APOTEKER	4	0,004	0	0,000	4	0,004
64	PSIKIATER PSIKOLOG	1	0,001	0	0,000	1	0,001
65	PELAUT	15	0,013	0	0,000	15	0,013
66	PENELITI	7	0,006	0	0,000	7	0,006
67	SOPIR	969	0,872	2	0,002	971	0,873
68	PARANORMAL	2	0,002	0	0,000	2	0,002
69	PEDAGANG	1,432	1,288	140	0,126	1,572	1,414
70	PERANGKAT DESA	25	0,022	0	0,000	25	0,022

71	KEPALA DESA	16	0.014	0	0.000	16	0.014
72	BIARAWATI	0	0.000	2	0.002	2	0.002
73	WIRASWASTA	18,076	16.259	350	0.315	18,426	16.574
74	LAINNYA	38	0.034	4	0.004	42	0.038
JUMLAH		95,251	85.676	15,925	14.324	111,176	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

BAB IV KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan, (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

A. Kelahiran

1. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Angka Kelahiran Kasar di Kabupten Pasaman Barat tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017
Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Kelahiran 2017	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2017	CBR
1	SUNGAI BEREMAS	53	26,283	2.02
2	LEMBAH MELINTANG	65	48,636	1.34
3	PASAMAN	206	73,540	2.80
4	TALAMAU	61	30,741	1.98
5	KINALI	195	70,504	2.77
6	GUNUNG TULEH	53	24,213	2.19
7	RANAH BATAHAN	59	26,431	2.23
8	KOTO BALINGKA	58	29,893	1.94
9	SUNGAI AUR	93	37,439	2.48
10	LUHAK NAN DUO	149	45,302	3.29
11	SASAK RANAH PESISIR	29	15,659	1.85
TOTAL		1,021	428,641	2.38

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dari tabel 4.1 terlihat Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 2,38 yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada pertengahan tahun 2017 terjadi rata-rata 2 kelahiran hidup. Dari tabel yang sama juga terlihat angka kelahiran kasar tertinggi terjadi di Kecamatan Pasaman dan angka kelahiran kasar terkecil berada di Kecamatan Lembah Melintang.

2. Angka Kelahiran Umum (*General Birth Rate*)

Angka kelahiran umum merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk wanita usia subur (15-45). Angka kelahiran umum merupakan indikator kelahiran yang lebih baik dibandingkan angka kelahiran kasar. Angka Kelahiran Umum di Kabupaten Pasaman Barat tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Angka Kelahiran Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Kelahiran 2017	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur	GBR
1	SUNGAI BEREMAS	53	6,658	7.96
2	LEMBAH MELINTANG	65	12,298	5.29
3	PASAMAN	206	18,440	11.17
4	TALAMAU	61	7,237	8.43
5	KINALI	195	18,156	10.74
6	GUNUNG TULEH	53	5,996	8.84
7	RANAH BATAHAN	59	6,650	8.87
8	KOTO BALINGKA	58	7,769	7.47
9	SUNGAI AUR	93	9,531	9.76
10	LUHAK NAN DUO	149	11,296	13.19
11	SASAK RANAH PESISIR	29	4,049	7.16
TOTAL		1,021	108,080	9.45

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dari tabel 4.2 terlihat Angka Kelahiran Umum di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 9,45 yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk wanita usia subur Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 terjadi 9-10 kelahiran hidup. Dari tabel yang sama juga terlihat angka kelahiran umum tertinggi

terjadi di Kecamatan Luhak Nan Duo dan angka kelahiran umum terkecil berada di Kecamatan Lembah Melintang.

3. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio*)

Rasio perempuan adalah perbandingan antara anak dibawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

Tabel 4.3 Rasio Anak dan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia 0-5 Tahun	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (15-45 Tahun)	CWR
1	SUNGAI BEREMAS	2,328	6,658	15.39
2	LEMBAH MELINTANG	3,715	12,298	13.47
3	PASAMAN	6,258	18,440	14.89
4	TALAMAU	2,088	7,237	12.26
5	KINALI	5,574	18,156	13.64
6	GUNUNG TULEH	1,924	5,996	14.14
7	RANAH BATAHAN	1,883	6,650	12.45
8	KOTO BALINGKA	2,199	7,769	12.76
9	SUNGAI AUR	2,934	9,531	13.62
10	LUHAK NAN DUO	3,776	11,296	14.66
11	SASAK RANAH PESISIR	1,254	4,049	13.55
TOTAL		33,933	108,080	13.84

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Pada tahun 2017, besarnya rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio-CWR*) di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 13,84. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia subur terdapat 13-14 balita. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas sudah menurun dari tahun 2016 (23,41). CWR tertinggi di wilayah Kecamatan Sungai Beremas yaitu 15,39, sedangkan CWR terendah di wilayah Kecamatan Talamau sebesar 12,26, dan Kecamatan Ranah Batahan sebesar 12,45.

B. Pendidikan

Indikator untuk mengukur kualitas penduduk di bidang pendidikan di suatu wilayah antara lain dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tanpa melihat umur siswa pada masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar SD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Usia SD	Jumlah Siswa SD	APK
1	SUNGGAI BEREMAS	3,537	3,040	85.95
2	LEMBAH MELINTANG	6,902	8,887	128.76
3	PASAMAN	9,430	4,400	46.66
4	TALAMAU	3,471	5,882	169.46
5	KINALI	9,136	5,588	61.16
6	GUNUNG TULEH	3,068	9,985	325.46
7	RANAH BATAHAN	3,277	3,595	109.70
8	KOTO BALINGKA	4,039	1,774	43.92
9	SUNGGAI AUR	5,118	4,847	94.70
10	LUHAK NAN DUO	5,417	3,389	62.56
11	SASAK RANAH PESISIR	1,810	3,314	183.09
TOTAL		55,205	54,701	99.09

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
- Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat

Angka Partisipasi Kasar SD di Kabupaten Pasaman Barat berada di bawah 100, artinya masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan SD dan semakin tinggi APK semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Dari tabel 4.4 terlihat bahwa terdapat 5 (lima) Kecamatan dengan APK diatas 100, yaitu

Kecamatan Lembah Melintang, Talamau, Gunung Tuleh, Ranah Batahan dan Sasak Ranah Pesisir. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa terdapat penduduk yang belum cukup usia SD sudah terdaftar sebagai siswa SD atau penduduk yang sudah melebihi usia SD masih terdaftar sebagai siswa SD di Kecamatan-Kecamatan tersebut. APK SD tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat terdapat di Kecamatan Gunung Tuleh sebesar yaitu sebesar 325,46 sedangkan APK terendah berada di Kecamatan Pasaman yaitu sebesar 46,66.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk sesuai dengan usia sekolahnya pada tingkat pendidikan tertentu, sehingga APM merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan APK.

**Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni SD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Usia SD	Jumlah Siswa Sesuai Usia SD (7-12 Tahun)	APM
1	SUNGAI BEREMAS	3,537	2,774	78.43
2	LEMBAH MELINTANG	6,902	7,828	113.42
3	PASAMAN	9,430	3,894	41.29
4	TALAMAU	3,471	5,230	150.68
5	KINALI	9,136	4,927	53.93
6	GUNUNG TULEH	3,068	8,832	287.87
7	RANAH BATAHAN	3,277	3,250	99.18
8	KOTO BALINGKA	4,039	1,532	37.93
9	SUNGAI AUR	5,118	4,392	85.81
10	LUHAK NAN DUO	5,417	2,992	55.23
11	SASAK RANAH PESISIR	1,810	2,877	158.95
TOTAL		55,205	48,528	87.91

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
- Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 4.5 terlihat Angka Partisipasi Murni SD di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 87,91; artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun terdapat 87-88 penduduk yang bersekolah di tingkat SD/Sederajat dan

sisanya merupakan proporsi siswa yang tinggal kelas atau siswa yang terlalu cepat sekolah ataupun putus sekolah.

3. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah menunjukkan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu.

**Tabel 4.6. Angka Putus Sekolah SD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Usia SD	Jumlah Siswa SD Putus Sekolah	APS
1	SUNGAI BEREMAS	3,537	14	0.40
2	LEMBAH MELINTANG	6,902	20	0.29
3	PASAMAN	9,430	17	0.18
4	TALAMAU	3,471	17	0.49
5	KINALI	9,136	18	0.20
6	GUNUNG TULEH	3,068	20	0.65
7	RANAH BATAHAN	3,277	15	0.46
8	KOTO BALINGKA	4,039	7	0.17
9	SUNGAI AUR	5,118	17	0.33
10	LUHAK NAN DUO	5,417	15	0.28
11	SASAK RANAH PESISIR	1,810	14	0.77
TOTAL		55,205	174	0.32

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2015 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
- Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat

Angka Putus Sekolah SD tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat terjadi di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir sebesar 0,77% sedangkan APS SD terendah ada di Kecamatan Koto Balingka sebesar 0,17%.

4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tabel di bawah ini disajikan rata-rata lama sekolah menurut kecamatan dan jenis kelamin, dimana untuk kabupaten Pasaman Barat rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas mencapai 5,85 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Pasaman Barat hanya mampu mencapai pendidikan SD.

**Tabel 4.7. Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		laki-laki	Perempuan	Rata-rata Total
1	SUNGAI BEREMAS	5.73	5.93	5.83
2	LEMBAH MELINTANG	5.94	6.00	5.97
3	PASAMAN	6.15	6.38	6.27
4	TALAMAU	5.23	5.48	5.36
5	KINALI	5.28	5.25	5.27
6	GUNUNG TULEH	5.97	6.19	6.08
7	RANAH BATAHAN	6.22	6.44	6.33
8	KOTO BALINGKA	5.48	5.52	5.50
9	SUNGAI AUR	5.76	5.95	5.86
10	LUHAK NAN DUO	6.63	6.65	6.64
11	SASAK RANAH PESISIR	5.46	5.45	5.46
RATA-RATA		5.79	5.91	5.85

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dilihat dari jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan relatif sama, yaitu hanya mampu menamatkan pendidikan SD. Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dapat disebabkan karena belum termutakhirkan data pendidikan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten ini. Untuk itu perlu diupayakan updating data pendidikan bagi penduduk pada saat pemberian pelayanan dokumen kependudukan baik dokumen KK, KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan dokumen lainnya. Jika dilihat per kecamatan maka penduduk di Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Ranah Batahan merupakan penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dan penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah penduduk di Kecamatan Kinali.

C. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika ada pertumbuhan ekonomi ada otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Target nasional tahun 2012 setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap mencapai 450 ribu orang. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja dan yang tidak bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan. Selanjutnya angkatan Kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (*employed*) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*).

Batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pasaman Barat ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Sekitar 68,47 persen penduduk Kabupaten Pasaman Barat termasuk dalam batas usia kerja (15-64 tahun) sedangkan sisanya sekitar 31,53 persen tidak tergolong penduduk usia kerja karena berumur dibawah 15 tahun dan lebih dari 64 tahun.

Tabel 4.8 memperlihatkan data kecamatan yang mempunyai jumlah tenaga kerja dengan persentase terbesar terdapat di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir yaitu sebesar 70,56 persen diikuti dengan Kecamatan Talamau 69,61 persen, dan Kecamatan Ranah Batahan 69,23 persen. Sedangkan kecamatan dengan persentase jumlah tenaga kerja terkecil terdapat di Kecamatan Lembah Melintang sebanyak 67,27 persen.

Tabel 4.8. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kerja	Tenaga Kerja (%)
			(Penduduk Usia Kerja 15-64 Tahun)	
1	SUNGAI BEREMAS	26,395	17,813	67.49
2	LEMBAH MELINTANG	48,704	32,764	67.27
3	PASAMAN	73,865	50,587	68.49
4	TALAMAU	30,737	21,397	69.61
5	KINALI	70,860	48,641	68.64
6	GUNUNG TULEH	24,293	16,533	68.06
7	RANAH BATAHAN	26,499	18,346	69.23
8	KOTO BALINGKA	29,971	20,452	68.24
9	SUNGAI AUR	37,488	25,436	67.85
10	LUHAK NAN DUO	45,380	31,302	68.98
11	SASAK RANAH PESISIR	15,712	11,086	70.56
TOTAL		429,904	294,357	68.47

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah tenaga kerja dapat pula dilihat menurut struktur umur sebagai berikut:

Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	15-19	22,633	7.73	21,571	7.38	44,204	15.1
2	20-24	21,013	7.1	20,117	6.8	41,130	13.9
3	25-29	18,065	6.13	17,564	5.97	35,629	12.1
4	30-34	18,629	6.28	17,824	6	36,453	12.28
5	35-39	17,577	6	16,886	5.77	34,463	11.77
6	40-44	14,711	4.96	14,118	4.77	28,829	9.73
7	45-49	12,431	4.23	11,985	4.08	24,416	8.31
8	50-54	9,727	3.32	9,928	3.37	19,655	6.69
9	55-59	8,754	2.97	8,695	2.96	17,449	5.94
10	60-64	5,979	2.07	6,150	2.11	12,129	4.18
JUMLAH		149,519	51.79	144,838	49.21	294,357	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 4.9 menunjukkan pula bahwa persentase tenaga kerja laki-laki lebih tinggi (51,79%) dibandingkan tenaga kerja perempuan (49,21%). Persentase tenaga kerja tertinggi berada pada kelompok umur 15-39 tahun. Demikian halnya dengan tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi pula.

2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 berjumlah 148.145 orang. Angkatan kerja yang tinggi akan membawa beban yang tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan. Jika lowongan pekerjaan tidak mampu menampung semua angkatan kerja (permintaan akan tenaga kerja lebih sedikit dari pada penawaran angkatan kerja), maka sebagian angkatan kerja akan menambah pengangguran. Penciptaan lapangan pekerjaan inilah yang menjadi salah masalah di bidang perekonomian. Kerawanan ini tidak hanya menyangkut masalah jumlah, yakni bagaimana memacu jumlah yang diminta agar mampu menyerap jumlah yang ditawarkan, akan tetapi juga masalah terkait dengan kualitas penduduk seperti tercermin dari pendidikan.

Tabel 4.10 memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 50,33 yang berarti hanya terdapat 50,33 persen penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang terlibat dalam kegiatan produktif. TPAK tertinggi terdapat di Kecamatan Ranah Batahan yaitu sebesar 55,49 sedangkan terendah Kecamatan Sungai Beremas sebesar 44,38.

Tabel 4.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	TDK BEKERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANKATAN KERJA	TENAGA KERJA	TPAK
1	SUNGAI BEREMAS	1,092	6,813	7,905	9,907	17,813	44.38
2	LEMBAH MELINTANG	1,920	15,316	17,236	15,528	32,764	52.61
3	PASAMAN	2,254	23,167	25,421	25,166	50,587	50.25
4	TALAMAU	1,332	9,810	11,142	10,255	21,397	52.07
5	KINALI	3,161	19,826	22,987	25,654	48,641	47.26
6	GUNUNG TULEH	921	8,022	8,943	7,590	16,533	54.09
7	RANAH BATAHAN	1,614	8,567	10,181	8,165	18,346	55.49
8	KOTO BALINGKA	1,489	9,850	11,339	9,113	20,452	55.44
9	SUNGAI AUR	1,740	11,930	13,670	11,766	25,436	53.74
10	LUHAK NAN DUO	1,257	13,100	14,357	16,945	31,302	45.87
11	SASAK RANAH PESISIR	635	4,329	4,964	6,122	11,086	44.78
TOTAL		17,415	130,730	148,145	146,211	294,357	50.33

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

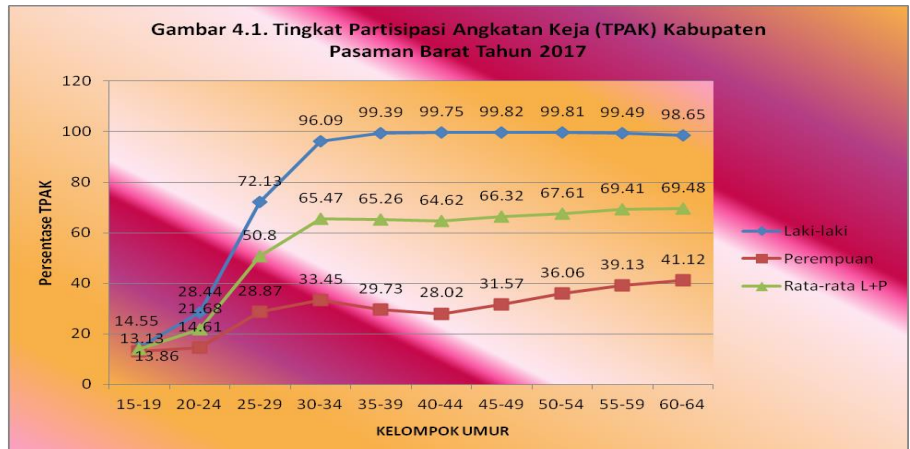
Jika dilihat dari jenis kelamin dari Tabel 4.11 terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (72,95%) lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (26,98%). Ini mencerminkan peluang tenaga kerja perempuan untuk terlibat di pasar kerja masih rendah. Hal ini diduga kelompok perempuan lebih banyak masuk pada kelompok bukan usia kerja, misalnya mengurus rumah tangga. Hal ini terlihat hampir untuk seluruh kecamatan.

Tabel 4.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja			TPAK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	15-19	3,293	2,832	6,125	22,633	21,571	44,204	14.55	13.13	13.86
2	20-24	5,976	2,939	8,915	21,013	20,117	41,130	28.44	14.61	21.68
3	25-29	13,031	5,070	18,101	18,065	17,564	35,629	72.13	28.87	50.80
4	30-34	17,901	5,963	23,864	18,629	17,824	36,453	96.09	33.45	65.47
5	35-39	17,470	5,020	22,490	17,577	16,886	34,463	99.39	29.73	65.26
6	40-44	14,674	3,956	18,630	14,711	14,118	28,829	99.75	28.02	64.62
7	45-49	12,409	3,784	16,193	12,431	11,985	24,416	99.82	31.57	66.32
8	50-54	9,709	3,580	13,289	9,727	9,928	19,655	99.81	36.06	67.61
9	55-59	8,709	3,402	12,111	8,754	8,695	17,449	99.49	39.13	69.41
10	60-64	5,898	2,529	8,427	5,979	6,150	12,129	98.65	41.12	69.48
JUMLAH		109,070	39,075	148,145	149,519	144,838	294,357	72.95	26.98	50.33

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dilihat dari kelompok umur, TPAK tertinggi berada pada kelompok umur 60-64 tahun untuk angkatan kerja perempuan dan TPAK tertinggi untuk angkatan kerja laki-laki berada pada kelompok umur 45-49 tahun. Jika digambarkan secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur dan jenis kelamin terlihat seperti gambar berikut :



Perlu diperhatikan adalah sebanyak 6.125 angkatan kerja berusia muda yaitu 15-19 tahun. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja, Jika kelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Secara keseluruhan, pola partisipasi angkatan kerja menurut umur ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada gambar 4.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jauh berada di bawah TPak laki-laki sejak usia 25 tahun. Partisipasi perempuan di pasar kerja hanya sekitar 26,98 persen dari seluruh penduduk perempuan. Kemungkinan hal ini terkait dengan kesibukan perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Akan tetapi, keadaan ini mungkin juga terkait dengan budaya yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah.

3. Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 4.12 menunjukkan angkatan kerja yang menganggur menurut pengelompokan umur lima tahunan. Dari tabel 4.12 terlihat bahwa pengangguran didominasi oleh kelompok umur muda yakni 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan 25-29 tahun. Diantara kelompok umur tersebut, kelompok umur 15-19 tahun yang paling besar jumlahnya.

**Tabel 4.12. Jumlah Pengangguran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

NO	KELOMPOK UMUR	Penduduk Tidak Bekerja			Jumlah Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	15-19	3,125	2,731	5,856	3,293	2,832	6,125	94.90	96.43	95.61
2	20-24	2,929	1,902	4,831	5,976	2,939	8,915	49.01	64.72	54.19
3	25-29	2,274	1,329	3,603	13,031	5,070	18,101	17.45	26.21	19.90
4	30-34	1,051	661	1,712	17,901	5,963	23,864	5.87	11.09	7.17
5	35-39	395	277	672	17,470	5,020	22,490	2.26	5.52	2.99
6	40-44	120	132	252	14,674	3,956	18,630	0.82	3.34	1.35
7	45-49	12,431	77	12,508	12,409	3,784	16,193	100.18	2.03	77.24
8	50-54	55	72	127	9,709	3,580	13,289	0.57	2.01	0.96
9	55-59	35	70	105	8,709	3,402	12,111	0.40	2.06	0.87
10	60-64	28	96	124	5,898	2,529	8,427	0.47	3.80	1.47
JUMLAH		22,443	7,347	29,790	109,070	39,075	148,145	20.58	18.80	20.11

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah pengangguran tertinggi pada kelompok umur 15-19 tahun yakni 95,61 persen. Selanjutnya jumlah pengangguran terendah berada pada kelompok umur 55-59 tahun yakni 0,87 persen .

Pengangguran yang berumur 15-19 tahun jumlahnya mendominasi secara keseluruhan yaitu sebesar 95,61 persen. Pengangguran pada kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan sehingga terpaksa mencari pekerjaan pada umur sekolah. Penduduk kelompok umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan dan belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal keterampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka

tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah pengangguran perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan sedikit lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki.

D. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum

ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 4.13. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Cacat Fisik	Cacat Netra/ Buta	Cacat Rungu/ Wicara	Cacat Mental/ Jiwa	Cacat Fisik dan Mental	Cacat Lainnya	Jumlah
1	SUNGAI BEREMAS	2	2	2	2	1	1	10
2	LEMBAH MELINTANG	5	4	4	6	2	4	25
3	PASAMAN	9	3	7	6	3	3	31
4	TALAMAU	7	7	7	14	6	4	45
5	KINALI	7	2	3	9	3	2	26
6	GUNUNG TULEH	2	1	6	4	0	2	15
7	RANAH BATAHAN	3	4	3	0	1	4	15
8	KOTO BALINGKA	2	1	2	3	3	4	15
9	SUNGAI AUR	3	2	2	6	0	3	16
10	LUHAK NAN DUO	4	1	2	5	8	4	24
11	SASAK RANAH PESISIR	2	1	2	5	0	1	11
TOTAL		46	28	40	60	27	32	233

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat yang terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak terlalu besar yakni 233 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Pasaman Barat yaitu 429.904 jiwa (0,05%). Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan tetap wajib memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas layanan umum lainnya.

Dilihat dari jumlah, penyandang cacat terbesar berada di Kecamatan Talamau yakni 45 orang, diikuti Kecamatan Pasaman yakni 31 orang, dan Kecamatan Kinali 26 orang serta Lembah Melintang 25 orang.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yakni pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota menghapus praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi

penyangang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Sedangkan hak-haknya adalah bahwa setiap penyangang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Langkah yang perlu ditempuh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyangang disabilitas yakni menjamin akses penyangang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau sarana umum baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dimana dalamnya harus termasuk identifikasi dan penghapusan semua hambatan terhadap aksesibilitas.

Berkaitan dengan akses kerja penyangang cacat, komitmen pemerintah dalam peningkatan persamaan hak untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap orang Indonesia termasuk penyangang cacat telah tertuang dan diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27 : (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D : (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kebijakan dan program Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa Dalam optimalisasi persamaan hak bagi penyangang cacat dan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, berbagai upaya telah dilakukan secara koordinatif dan berkelanjutan, dengan mengacu pada peraturan perundangundangan. Bagi tenaga kerja penyangang cacat yang tidak tertampung di Sektor Formal diarahkan pada Sektor Informal dengan Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyangang Cacat dimaksudkan untuk mendorong menumbuhkan iklim Usaha Mandiri dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan, Bimbingan/Panduan Usaha baik perorangan maupun kelompok.

BAB V MOBILITAS PENDUDUK

Perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan salah satu dari tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Komponen ini bersama dengan kelahiran dan kematian mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah seperti jumlah, komposisi, dan distribusi keruangan. Tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi, kelancaran sarana transportasi antar wilayah, dan pembangunan wilayah dalam kaitannya dengan desentralisasi pembangunan.

Analisis dan perkiraan besaran dan arus perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya.

Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi (*new economics of migration*) beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam.

Dari kedua teori di atas jelas, bahwa migrasi disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) suatu wilayah dan faktor penarik (*pull factor*) wilayah lainnya.

Faktor pendorong suatu wilayah menyebabkan orang pindah ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Perpindahan penduduk ini juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Sedangkan faktor penarik suatu wilayah adalah jika wilayah tersebut mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian berpindah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

A. Migrasi Masuk

Jumlah penduduk dari luar Provinsi Sumatera Barat yang masuk ke Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2017 sebanyak 7.275 orang (62,31%), sedangkan yang berasal dari Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.400 orang (37,69%) sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang masuk ke Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 11.675 orang.

Tabel 5.1. Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Luar Provinsi		Luar Kabupaten Dalam Satu Provinsi		Jumlah Migrasi Masuk	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n	%
1	SUNGAI BEREMAS	800	6.85	168	1.44	968	8.29
2	LEMBAH MELINTANG	755	6.47	346	2.96	1,101	9.43
3	PASAMAN	794	6.80	1,139	9.76	1,933	16.56
4	TALAMAU	403	3.45	406	3.48	809	6.93
5	KINALI	832	7.13	924	7.91	1,756	15.04
6	GUNUNG TULEH	328	2.81	210	1.80	538	4.61
7	RANAH BATAHAN	595	5.10	197	1.69	792	6.78
8	KOTO BALINGKA	603	5.16	79	0.68	682	5.84
9	SUNGAI AUR	1,310	11.22	224	1.92	1,534	13.14
10	LUHAK NAN DUO	736	6.30	563	4.82	1,299	11.13
11	SASAK RANAH PESISIR	119	1.02	144	1.23	263	2.25
TOTAL		7,275	62.31	4,400	37.69	11,675	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa migran masuk dari luar Kabupaten Pasaman Barat tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan terbanyak yang menerima migran dari luar Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman yaitu sebanyak 1.933 orang (16,56%), diikuti dengan Kecamatan Kinali sebanyak 1.756 orang (15,04%), dan Kecamatan Sungai Aur sebanyak 1.534 orang (13,14%). Sementara Kecamatan yang paling sedikit menerima migran adalah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir sebanyak 263 orang (2,25%).

Migran masuk dari luar Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari beberapa karakteristik misalnya dari jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2. Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	SUNGGAI BEREMAS	531	4.55	437	3.74	968	8.29
2	LEMBAH MELINTANG	557	4.77	544	4.66	1,101	9.43
3	PASAMAN	981	8.40	952	8.15	1,933	16.56
4	TALAMAU	417	3.57	392	3.36	809	6.93
5	KINALI	904	7.74	852	7.30	1,756	15.04
6	GUNUNGTULEH	242	2.07	296	2.54	538	4.61
7	RANAH BATAHAN	393	3.37	399	3.42	792	6.78
8	KOTO BALINGKA	339	2.90	343	2.94	682	5.84
9	SUNGGAI AUR	852	7.30	682	5.84	1,534	13.14
10	LUHAK NAN DUO	660	5.65	639	5.47	1,299	11.13
11	SASAK RANAH PESISIR	131	1.12	132	1.13	263	2.25
TOTAL		6,007	51.45	5,668	48.55	11,675	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Data yang ditampilkan pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa proporsi migran yang datang ke Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak migran laki-laki yaitu berjumlah 6.007 orang (51,45%), sementara migran perempuan berjumlah 5.668 orang (48,55%).

B. Migrasi Keluar

Jumlah penduduk dari Kabupaten Pasaman Barat yang pindah keluar Kabupaten luar Propinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 sebanyak 2.659 jiwa (62,24%), sedangkan penduduk dari Kabupaten Pasaman Barat yang pindah keluar Kabupaten Pasaman Barat tapi masih di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.613 jiwa (37,76%) sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang pindah keluar Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4.272 jiwa.

Tabel 5.3. Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Luar Provinsi		Luar Kabupaten Dalam Satu Provinsi		Jumlah Migrasi Keluar	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n	%
1	SUNGAI BEREMAS	192	4.49	110	2.57	302	7.07
2	LEMBAH MELINTANG	258	6.04	98	2.29	356	8.33
3	PASAMAN	408	9.55	424	9.93	832	19.48
4	TALAMAU	223	5.22	172	4.03	395	9.25
5	KINALI	369	8.64	280	6.55	649	15.19
6	GUNUNG TULEH	115	2.69	45	1.05	160	3.75
7	RANAH BATAHAN	156	3.65	47	1.10	203	4.75
8	KOTO BALINGKA	175	4.10	40	0.94	215	5.03
9	SUNGAI AUR	314	7.35	126	2.95	440	10.30
10	LUHAK NAN DUO	346	8.10	219	5.13	565	13.23
11	SASAK RANAH PESISIR	103	2.41	52	1.22	155	3.63
TOTAL		2,659	62.24	1,613	37.76	4,272	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa migran keluar Kabupaten Pasaman Barat tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan dengan jumlah migran keluar terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman yaitu sebanyak 832 jiwa (19,48%), diikuti dengan Kecamatan Kinali sebanyak 649 jiwa (15,19%), Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 565 jiwa (13,23%). Sementara Kecamatan dengan jumlah migran keluar paling sedikit adalah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir sebanyak 155 jiwa (3,63%).

Migran keluar Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari beberapa karakteristik misalnya dari jenis kelamin. Data yang ditampilkan pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa proporsi migran keluar Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak terdapat pada penduduk laki-laki yaitu sebanyak 2.186 jiwa (51,17%) dibanding dengan penduduk perempuan yaitu sebanyak 2.086 jiwa (48,83%).

Tabel 5.4. Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	SUNGAIBEREMAS	145	3.39	157	3.68	302	7.07
2	LEMBAH MELINTANG	170	3.98	186	4.35	356	8.33
3	PASAMAN	435	10.18	397	9.29	832	19.48
4	TALAMAU	217	5.08	178	4.17	395	9.25
5	KINALI	356	8.33	293	6.86	649	15.19
6	GUNUNGTULEH	75	1.76	85	1.99	160	3.75
7	RANAH BATAHAN	103	2.41	100	2.34	203	4.75
8	KOTO BALINGKA	101	2.36	114	2.67	215	5.03
9	SUNGAIAUR	219	5.13	221	5.17	440	10.30
10	LUHAK NAN DUO	288	6.74	277	6.48	565	13.23
11	SASAK RANAH PESISIR	77	1.80	78	1.83	155	3.63
TOTAL		2,186	51.17	2,086	48.83	4,272	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil kemendagri, diolah

C. Migrasi Netto

Migrasi Netto merupakan angka yang menunjukkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar dengan cara memperhitungkan antara jumlah migran yang masuk dan keluar pada tahun yang sama dan jumlah penduduk daerah asal pada pertengahan. Jika migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar maka diperoleh Angka Migrasi Netto yang bernilai positif dan sebaliknya jika migrasi masuk lebih kecil dari migrasi keluar, Angka Migrasi Netto akan bernilai negatif.

Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh angka migrasi masuk sebesar 11.675 jiwa

dan angka migrasi keluar sebesar 4.272 jiwa. Dari perhitungan migrasi netto, diperoleh angka migrasi netto untuk Kabupaten Pasaman Barat sebesar 17,27 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat mempunyai angka migrasi netto positif. Artinya bahwa kedatangan penduduk baru di Kabupaten Pasaman Barat lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar.

Tabel 5.5. Jumlah Migrasi Netto Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2017	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Netto
1	SUNGAI BEREMAS	26,283	968	302	25.34
2	LEMBAH MELINTANG	48,636	1,101	356	15.32
3	PASAMAN	73,540	1,933	832	14.97
4	TALAMAU	30,741	809	395	13.47
5	KINALI	70,504	1,756	649	15.70
6	GUNUNG TULEH	24,213	538	160	15.61
7	RANAH BATAHAN	26,431	792	203	22.28
8	KOTO BALINGKA	29,893	682	215	15.62
9	SUNGAI AUR	37,439	1,534	440	29.22
10	LUHAK NAN DUO	45,302	1,299	565	16.20
11	SASAK RANAH PESISIR	15,659	263	155	6.90
TOTAL		428,641	11,675	4,272	17.27

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Ada 2 sisi interpretasi yang dapat diberikan dengan keadaan ini, yang pertama Kabupaten Pasaman Barat dianggap cukup kondusif dan aman, sehingga banyak penduduk yang datang dan menetap serta melakukan aktivitas ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat yang juga di topang karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah pemekaran yang baru berkembang sehingga peluang lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang berlimpah menjadi pematik bagi penduduk dari luar Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, besarnya penduduk yang datang secara tidak langsung akan memberatkan APBD, karena pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai infrastruktur untuk masyarakatnya. Pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan akan semakin

berat, permasalahan sosial akan muncul seperti berbagai tindak kriminal, kawasan hijau semakin berkurang akibat kebutuhan tempat tinggal dan tempat berkebun, jumlah kendaraan terus bertambah dan suatu saat dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang pada gilirannya akan menambah tingginya suhu udara.

BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sesuai kesepakatan didalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya

Tabel 6.1 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Telah Cetak KK	Jumlah Belum Cetak KK	Jumlah KK	Persentase Telah Cetak KK
1	SUNGAI BEREMAS	5,382	864	6,246	86.17
2	LEMBAH MELINTANG	9,410	1,944	11,354	82.88
3	PASAMAN	16,849	2,396	19,245	87.55
4	TALAMAU	6,658	1,184	7,842	84.90
5	KINALI	16,095	1,952	18,047	89.18
6	GUNUNG TULEH	5,165	1,047	6,212	83.15
7	RANAH BATAHAN	5,707	1,006	6,713	85.01
8	KOTO BALINGKA	6,201	1,154	7,355	84.31
9	SUNGAI AUR	7,921	1,401	9,322	84.97
10	LUHAK NAN DUO	10,579	1,417	11,996	88.19
11	SASAK RANAH PESISIR	3,562	467	4,029	88.41
TOTAL		93,529	14,832	108,361	86.31

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 6.1 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Pasaman Barat. Dari 108.361 kepala keluarga ternyata sebanyak 93.529 telah memiliki Kartu Keluarga. Yang perlu diperhatikan ternyata ada 14.832 keluarga yang tidak memiliki KK (8,97%) sehingga perlu dicari faktor penyebabnya. Bila menurut kecamatan, maka persentase kepemilikan KK yang paling rendah di Kecamatan Lembah Melintang (82,88%) dan Kecamatan Gunung Tuleh (83,15%). Sedangkan persentase kepemilikan Kartu Keluarga yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Kinali (89,18%).

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin,

dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tabel 6.2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Penduduk Wajib KTP-el	Kepemilikan KTP-el	Persentase Kepemilikan KTP-el
1	SUNGAI BEREMAS	17,340	14,046	81.00
2	LEMBAH MELINTANG	32,402	26,208	80.88
3	PASAMAN	50,756	41,133	81.04
4	TALAMAU	22,154	16,950	76.51
5	KINALI	48,573	36,938	76.05
6	GUNUNG TULEH	16,745	13,433	80.22
7	RANAH BATAHAN	18,512	14,347	77.50
8	KOTO BALINGKA	20,213	14,950	73.96
9	SUNGAI AUR	25,125	18,260	72.68
10	LUHAK NAN DUO	31,715	26,513	83.60
11	SASAK RANAH PESISIR	11,163	8,634	77.34
TOTAL		294,698	231,412	78.53

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa dari 294.698 jiwa wajib KTP-el pada Tahun 2017, sebanyak 231.412 jiwa penduduk atau sebesar 78,53% sudah memiliki KTP-el. Persentase penduduk terbesar yang telah memiliki KTP-el berada di Kecamatan Luhak Nan Duo yaitu sebesar 83,60%, disusul Kecamatan Sungai Beremas sebesar 81,04% dan Kecamatan Pasaman sebesar 81,04 %. Sedangkan persentase penduduk terkecil yang telah memiliki KTP-el berada di Kecamatan Sungai Aur yaitu sebesar 72,68%.

C. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 6.3. Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	L	P	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
1	SUNGAI BEREMAS	4,130	4,029	8,159	26,395	30.91
2	LEMBAH MELINTANG	8,118	8,165	16,283	48,704	33.43
3	PASAMAN	10,657	10,859	21,516	73,865	29.13
4	TALAMAU	4,193	4,121	8,314	30,737	27.05
5	KINALI	8,736	8,702	17,438	70,860	24.61
6	GUNUNG TULEH	3,918	3,846	7,764	24,293	31.96
7	RANAH BATAHAN	3,654	3,568	7,222	26,499	27.25
8	KOTO BALINGKA	4,679	4,657	9,336	29,971	31.15
9	SUNGAI AUR	5,827	5,886	11,713	37,488	31.24
10	LUHAK NAN DUO	6,254	6,206	12,460	45,380	27.46
11	SASAK RANAH PESISIR	2,206	2,188	4,394	15,712	27.97
TOTAL		62,372	62,227	124,599	429,904	28.98

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 6.3 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin terhadap total penduduk Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 28,98% (124.599 orang), sedangkan 305.305 orang penduduk (71,02%) belum mempunyai akta kelahiran. Data ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Pasaman Barat belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat langkah-langkah terobosan agar persentase kepemilikan akta kelahiran ini dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

2. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan bukti legal hubungan keperdataan pemilik akta dengan ahli warisnya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya, data tentang tempat dan tanggal lahir serta data tentang tempat dan tanggal kematian. Akta kematian penting untuk dimiliki oleh seorang karena digunakan oleh ahli waris yang bersangkutan pada saat mengurus pensiun kematian, serta hak waris lainnya.

Jumlah pengurusan akta kematian di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2017 tercatat sebanyak 995 orang. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk yang meninggal. Hal utama yang menyebabkan sedikitnya pengurusan akta kematian ini adalah karena masyarakat menganggap akta kematian bukanlah suatu dokumen yang penting untuk diurus apabila tidak ada keperluan atau urusan yang mensyaratkan akta kematian sebagai salah satu kelengkapannya.

3. Akta Perkawinan / Surat Nikah

Akta perkawinan/surat nikah merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta perkawinan/status kawin memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel 6.4 Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Perkawinan/Surat Nikah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin			Penduduk Kawin Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	SUNGAI BEREMAS	5,299	5,338	10,637	1,036	954	1,990	1.07
2	LEMBAH MELINTANG	9,291	9,310	18,601	1,414	1,273	2,687	1.45
3	PASAMAN	16,860	16,755	33,615	2,747	2,489	5,236	2.82
4	TALAMAU	6,590	6,537	13,127	1,431	1,327	2,758	1.49
5	KINALI	16,292	16,366	32,658	2,729	2,545	5,274	2.85
6	GUNUNG TULEH	5,035	5,019	10,054	1,058	949	2,007	1.08
7	RANAH BATAHAN	5,600	5,581	11,181	862	795	1,657	0.89
8	KOTO BALINGKA	6,093	6,123	12,216	1,148	1,081	2,229	1.20
9	SUNGAI AUR	7,662	7,659	15,321	1,253	1,145	2,398	1.29
10	LUHAK NAN DUO	10,510	10,399	20,909	2,478	2,312	4,790	2.58
11	SASAK RANAH PESISIR	3,549	3,486	7,035	580	540	1,120	0.60
TOTAL		92,781	92,573	185,354	16,736	15,410	32,146	17.34

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2017 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel 6.4 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan/surat nikah, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang berstatus kawin sebanyak 185.354 orang dan yang memiliki akta kawin/surat nikah hanya 17,34% atau sebanyak 32.146 orang, sedangkan yang tidak memiliki akta kawin/surat nikah persentasenya cukup tinggi yakni 82,66% (153.208 orang). Hal ini biasa ditemukan diseluruh indonesia, karena ada diantara penduduk terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara atau penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum mencatatkan

akta kawin (buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, karena perkawinan mereka dicatat oleh KUA setempat.

Perlu menjadi catatan bahwa masih ada 153.208 orang penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta perkawinan/surat nikah. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya pengisian formulir biodata penduduk.

Peran pemerintah sangat diperlukan guna mendata penduduk berstatus kawin lebih lengkap khususnya bagi penduduk muslim. Jika kondisi di lapangan memang demikian, pemerintah perlu memprogramkan pendataan kepemilikan dokumen perkawinan untuk muslim bahkan tidak menutup kemungkinan melaksanakan program perkawinan masal bagi yang sudah menikah jika masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen perkawinan.

4. Akta Perceraian / Surat Cerai

Akta perceraian/surat cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel. 6.5 menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Pasaman Barat berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian. Terlihat bahwa dari total sebanyak 4.014 penduduk berstatus cerai hidup, yang memiliki akta perceraian/surat cerai hanya sebanyak 425 orang (10,59%) dan umumnya tidak penduduk yang berstatus cerai hidup memiliki akta perceraian/surat cerai. Besarnya penduduk berstatus cerai yang tidak memiliki akta perceraian diduga karena penduduk tersebut tidak mencatatkan perceraianya

Tabel 6.5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Berstatus Cerai Hidup			Jumlah Penduduk Cerai Hidup Memiliki Akta Perceraian/Surat Cerai			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	SUNGAI BEREMAS	31	144	175	2	12	14	8.00
2	LEMBAH MELINTANG	78	414	492	8	26	34	6.91
3	PASAMAN	159	687	846	32	75	107	12.65
4	TALAMAU	75	245	320	12	22	34	10.63
5	KINALI	117	375	492	31	35	66	13.41
6	GUNUNG TULEH	61	190	251	7	13	20	7.97
7	RANAH BATAHAN	45	189	234	5	12	17	7.26
8	KOTO BALINGKA	55	229	284	4	9	13	4.58
9	SUNGAI AUR	76	297	373	7	14	21	5.63
10	LUHAK NAN DUO	84	326	-	36	59	95	23.17
11	SASAK RANAH PESISIR	24	113	137	1	3	4	2.92
TOTAL		805	3,209	4,014	145	280	425	10.59

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2016 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah dan proporsi kepemilikan akta perceraian/surat cerai ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurang pemahannya penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan diduga kurangnya sosialisasi kepada penduduk. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan permasalahan lain misalnya dalam pengurusan hak waris, yang pada akhirnya akan berdampak kepada pemerintah daerah.

BAB VII PENUTUP

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penduduk menurut berbagai variabel. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain misalnya menggambarkan proporsi dan jumlah pengangguran dan sebagainya. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan yang bersumber dari data pelayanan SIAK Kabupaten Pasaman Barat yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara berkala setiap semester, serta data yang diperoleh dari instansi terkait.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pasaman Barat ini akan disajikan secara berkala. Pada profil mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri masyarakat sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan pelaporan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang. Kami menyadari bahwa buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyajian data, tata bahasa dan hal-hal lain yang perlu perbaikan guna penyempurnaan penyusunan buku perkembangan kependudukan berikutnya. Untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan

dari semua pihak, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sehingga dapat menjadi perbaikan dimasa datang, terima kasih.